

Edisi Khusus ■ 2019

semai

Untuk Keadilan dan Demokrasi

**PEREMPUAN
DAN ENERGI
TERBARUKAN**

DAFTAR ISI

- Catatan sekretaris jenderal – 1
- Perempuan dan Energi (Perkenalan Koalisi Perempuan Indonesia) – 3
- Adakah Energi Bersih dan Inklusif untuk Perempuan – 5
- Perempuan Dapat Berperan Sentral dalam Memperluas Akses Energi – 7
- Perempuan dan Energi - Laporan dari Halmahera, pulau seribu, dan Jawa Tengah – 10
- Rencana Umum Energi Daerah dalam Peningkatan Peran Strategis Perempuan untuk Mendorong Pemerintah Mewujudkan Energi Hijau dan Inklusi – 16
- Pengalaman Peserta Mengikuti Pelatihan Gals yang Melibatkan Laki-laki dan Perempuan – 19
- Diskusi Rutin Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Energi Bersih Terbarukan (EBT) – 22
- Pelatihan Advokasi Dasar Balai Perempuan Sebagai Pusat Informasi Pengaduan Dan Advokasi Energi (Bp Pipa Energi) Jawa Tengah – 26
- Pelatihan Gals Di Jakarta Dan Kota Salatiga – 29
- Lasiyem, Dorong Perempuan Mengakses Kompiler Minyak Jelantah – 33
- Peran Strategis Perempuan Untuk Mewujudkan Goals 7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan – 35

REDAKSI

PENANGGUNG JAWAB/ PIMPINAN REDAKSI :

Dian Kartika Sari , SH

REDAKTUR PELAKSANA :

Bayu Sustiwi

TIM REDAKSI :

Sutriyatmi, Muntakhanah, Ria Yulianti, Dewi Yani, Linarti, Lia Anggiasih, Melda Imanuella, Meidina Ingrid, Farida Indriani, Welly Kono

SIRKULASI DAN DISTRIBUSI: Dyah Bintarini, Ariyanto, Yasinta Intan Nur Aisyah, Syarif Hidayat, Tarsa Wiria & M . Nurul Huda

LAYOUTER :

Afriyanto Haribudi, K

SALAM REDAKSI

Perempuan, bukan hanya pengguna dan penikmat EBT. Namun sebagian dari kelompok perempuan mampu membangun instalasi EBT, sehingga menghasilkan energi listrik dan energi api dari biogas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pengembangan EBT

SEMAI edisi kali ini membahas tentang bagaimana anggota Koalisi Perempuan Indonesia menggunakan dan mengakses energi untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana pengalaman perempuan di Halmahera Tengah, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga. Artikel lain juga bagaimana anggota mengikuti pelatihan GALS dan pengalaman mengikuti pelatihan konsumen Cerdas . Selain itu pengalaman anggota Koalisi Perempuan Indonesia mengikuti berbagai peningkatan kapasitas anggota melalui Pelatihan advokasi dasar juga diskusi rutin yang dilaksanakan di Balai Perempuan.

Semoga edisi kali ini dapat memberikan gambaran dan bagaimana Koalisi Perempuan Indonesia yang masih baru dalam isu energi bekerja. Tak lupa saran, kritik dan masukan kami nantikan dari pembaca semua.

Selamat membaca.

ENERGI BERSIH TERBARUKAN untuk SEMUA

Tim Redaksi

KEUANGAN :

Sabriyah Suleman , Liessya E, Ria Nurbani, Emi Kartika, Annisa Dinda, Dwi Hartini

ALAMAT REDAKSI :

Jalan Siaga I No 2B Pejaten Barat , Pasar Minggu , Jakarta Selatan 12510

E : sekretariat@koalisperempuan.or.id

W: www.koalisperempuan.or.id

F : Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi

T : @womencoalition

IG : Womencoalition

Redaksi menerima kiriman berita tentang kegiatan di wilayah, cabang dan Balai Perempuan . Surat pembaca di kirimkan ke sekretariat Koalisi Perempuan Indonesia. Artikel atau berita yang dimuat akan mendapat hadiah souvenir yang menarik.

CATATAN SEKRETARIS JENDERAL



DIAN KARTIKASARI
*Sekretaris Jenderal Koalisi
Perempuan Indonesia*

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ENERGI BERSIH TERBARUKAN

Ketersediaan Energi Bersih Terbarukan (EBT) sangat berpengaruh pada pembagian peran, pencitraan dan kerentanan yang dilekatkan secara sosial terhadap perempuan dan laki-laki.

EBT DAN KEBERDAYAAN PEREMPUAN

Dalam pembagian peran secara sosial dan tradisional, perempuan dan laki-laki memiliki tanggungjawab berbeda. Perempuan bertanggungjawab melakukan pekerjaan dalam rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan seterika, membersihkan rumah, merawat anak dan laki-laki bertanggung jawab melakukan kerja-kerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Dalam melakukan kerja-kerja rumah tangga inilah, perempuan bersinggungan langsung dengan kebutuhan energi, terutama energi api untuk memasak dan energi listrik untuk menyediakan air, penerangan dan menjalankan peralatan rumah tangga lainnya. Ketersediaan energi ini akan berpengaruh pada derajat kesehatan perempuan serta peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan yang memasak menggunakan kayu bakar, memiliki potensi menderita infeksi saluran pernafasan akut (ISPA) lebih besar dibandingkan perempuan yang memasak menggunakan biogas. Perempuan yang memiliki akses terhadap listrik dan menggunakan peralatan elektronik untuk melakukan pekerjaan rumah tangganya, dapat melakukan pekerjaannya lebih cepat dan lebih ringan, sehingga mereka memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dan bersosialisasi dengan masyarakat. Sebaliknya, perempuan yang mengerjakan semua kerja rumah tangganya tanpa bantuan perabot (peralatan rumah tangga) elektronik, membutuhkan tenaga lebih banyak dan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan pekerjaannya, terkadang mereka juga harus mengeluarkan biaya lebih besar, dibandingkan dengan perempuan yang memiliki akses energi. Perempuan yang hidup tanpa akses energi, terutama EBT harus mengeluarkan uang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Disamping itu mereka juga tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk beristirahat, hidup sehat dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Padahal, ketersediaan dana, waktu untuk istirahat dan bersosialisasi serta hidup yang sehat merupakan modal dasar untuk mewujudkan keberdayaan perempuan. Jadi, fakta menunjukkan bahwa semakin rendah akses perempuan terhadap energi, khususnya EBT, semakin kecil pula kesempatan untuk meningkatkan keberdayaan perempuan.

PARTISIPASI PEREMPUAN MEWUJUDKAN EBT

Perempuan, bukan hanya pengguna dan penikmat EBT. Namun sebagian dari kelompok perempuan mampu membangun instalasi EBT, sehingga menghasilkan energi listrik dan energi api dari biogas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Fakta ini menunjukkan bahwa perempuan dapat berpartisipasi dalam pengembangan EBT. Namun sayangnya, partisipasi perempuan dalam pengembangan EBT seringkali tidak diperhitungkan. Akibatnya, pengembangan instalasi dan pemanfaatan EBT tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan, sehingga perempuan tidak terlalu menikmati manfaat pengembangan EBT.

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengembangan EBT perlu dilakukan, agar perempuan dapat menikmati manfaat EBT dan mengurangi beban ganda serta kerentanan perempuan. Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengembangan EBT, tidak cukup dengan mengundang perempuan hadir dalam rapat-rapat perencanaan pengembangan EBT. Namun lebih dari itu, perempuan harus diberdayakan terlebih dahulu agar dapat mengidentifikasi kebutuhannya dan memperjuangkan pemenuhan kebutuhannya tersebut dalam rapat-rapat pengambilan keputusan. Tanpa pemberdayaan perempuan terlebih dahulu, peningkatan partisipasi dalam wujud peningkatan jumlah perempuan menghadiri rapat pengambilan keputusan saja, tidak akan mampu menyuarakan kebutuhan perempuan.

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENGEMBANGAN EBT

Pengarusutamaan gender dalam pengembangan EBT adalah melihat dampak dari fakta-fakta ketimpangan akses terhadap energi dan rendahnya partisipasi perempuan dalam pengembangan EBT. Ketimpangan akses serta rendahnya partisipasi perempuan ini akan berdampak pada kurangnya perempuan dalam pengambilan keputusan (kontrol) yang pada gilirannya mengakibatkan kurangnya manfaat pengembangan EBT bagi perempuan.

Dengan metode Pengarusutamaan gender ini, ketimpangan akses terhadap energi diupayakan untuk diselesaikan, melalui pengembangan EBT, seperti pengembangan penggunaan mikro hidro untuk listrik rumah tangga, pemanfaatan biogas untuk kompor. Pengembangan EBT harus melibatkan perempuan, agar penggunaan peralatan atau instalasi EBT mudah dioperasikan oleh perempuan dan minim risiko bencana. Sehingga perempuan dapat menggunakan EBT dengan mudah serta aman.

Pemanfaatan EBT secara mudah serta aman ini pada gilirannya akan mengurangi beban kerja dan waktu kerja perempuan. Sehingga perempuan menjadi lebih produktif, lebih sehat, mampu mengurangi beban keuangan rumah tangga, memiliki waktu untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat dan dapat berperan serta dalam pembangunan.

PEREMPUAN DAN ENERGI

PERKENALAN KOALISI PEREMPUAN INDONESIA

Isu energi selama ini dianggap bukan isu perempuan atau tidak dekat dengan kelompok perempuan. Perempuan hanya ditempatkan sebagai konsumen energi, itupun dengan kondisi mayoritas perempuan tidak menjadi konsumen energi yang kritis. Bicara sektor energi dianggap erat kaitannya dengan sektor teknologi baik yang hardware maupun software, dimana lagi-lagi perempuan tidak diperhitungkan dalam sektor ini. Disisi lain perempuan sendiri juga kadang enggan dengan dunia teknik semacam ini. Termasuk jika kita bicara energi baru terbarukan.

Koalisi Perempuan Indonesia yang memiliki 18 kelompok kepentingan sebenarnya telah lama bersentuhan dengan isu energi terbarukan, terutama di kelompok kepentingan perempuan petani yang memiliki potensi sumber EBT dari kotoran hewan ternak mereka. Sekitar tahun 2013, Koalisi Perempuan Indonesia cabang Sumba Tengah-Nusa Tenggara Timur telah dilatih untuk mengolah kotoran ternak menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik untuk penerangan dan gas untuk memasak. Sayangnya setelah pelatihan, praktek pengolahan biogas ini belum dilakukan secara optimal. Bicara mengenai potensi, selain yang berada disekitar kelompok kepentingan petani, potensi sumber EBT juga banyak ditemukan di sekitar kelompok kepentingan perempuan pesisir dan nelayan. Karena mereka tinggal di daerah pesisir dengan sinar matahari yang banyak, energi angin yang besar dan juga ada gelombang laut yang potensial diolah sebagai sumber EBT. Balai-balai perempuan Koalisi Perempuan Indonesia yang berada di daerah perdesaan bukit atau gunung, selain memiliki potensi sinar matahari, juga banyak yang memiliki air terjun di sekitarnya. Namun secara teknis Koalisi Perempuan Indonesia saat ini belum menguasai ilmu keterampilan pengelolaan semua jenis potensi sumber-sumber EBT ini. Oleh karena itu penting bagi organisasi untuk membangun jejaring kerja dengan organisasi lain, baik non pemerintah, pemerintah, perguruan tinggi dan sektor swasta yang memiliki perhatian pada pengembangan sumber-sumber EBT ini.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG ENERGI

Mandat organisasi Koalisi Perempuan Indonesia salah satunya adalah sebagai kelompok pengkaji dan pengusul kebijakan. Sebagai organisasi yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat yang adil gender, Koalisi Perempuan Indonesia melihat pentingnya keterlibatan perempuan dalam proses-proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan publik. Termasuk didalamnya bagaimana produk kebijakan juga harus memiliki perspektif keadilan gender dan inklusi sosial. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan bidang energi ini juga harus memiliki perspektif gender dan inklusi sosial. Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan lainnya menjadi keharusan.

Perempuan seringkali harus menjalankan 3 (tiga) peran sekaligus dan ketiganya yang sangat penting. Mereka memiliki peran reproduktif dimasa salah satunya terkait dengan ketersediaan makanan di rumah, air bersih, pakaian yang bersih dan rapi serta kebutuhan lain yang menjadi pekerjaan domestik. Meskipun tidak mengerjakan atau menyiapkan sendiri secara langsung, beban domestik untuk memastikan kebutuhan tersebut terpenuhi mayoritas masih merupakan tanggung jawab perempuan. Dalam pemenuhan kebutuhan inilah perempuan bersentuhan dengan energi yang akan digunakan untuk memasak, penerangan, sumber tenaga peralatan kebersihan, sumber tenaga lemari pendingin yang sekarang juga bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan ASI bagi perempuan pekerja yang sedang menyusui dan sejenisnya. Peran berikutnya adalah peran produktif perempuan. Banyak anggota Koalisi Perempuan Indonesia yang memiliki usaha di rumahnya dengan beragam jenis mulai dari toko online, membuka kedai/warung, bisnis bengkel, batik, tenun, beternak dan lainnya. Belum mereka yang bekerja di perkantoran, pabrik, perhotelan serta sektor lain. Perempuan dengan sumber-sumber pendapatan sebagai nafkah untuk keluarganya ini memiliki kebutuhan tinggi pada energi yang menjadi sumber tenaga alat produksinya. Yang lain adalah peran sosial yang juga melekat pada perempuan. Dalam kehidupan bermasyarakat, perempuan memiliki hak untuk berorganisasi, bersosialisasi dengan lingkungan, hak untuk mengekspresikan diri dan emosinya melalui kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Kegiatan tersebut juga memerlukan energi untuk mendukungnya, seperti bahan bakar untuk transportasinya, listrik untuk penerangan, tenaga untuk mengisi daya gadget-nya, tenaga untuk alat pengeras suara yang digunakan dalam kegiatan organisasi dan masih banyak lagi. Tiga peranan ini jelas dekat dan membutuhkan sumber-sumber energi. Maka tidak bisa dipungkiri lagi bahwa isu energi ini sangat erat kaitannya dengan perempuan.

ADVOKASI KEBIJAKAN

Upaya Koalisi Perempuan Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan didasarkan pada bukti yang diperoleh di lapangan, bagaimana pengalaman perempuan dan kelompok rentan lainnya selama ini, khususnya tentang EBT. Pertama yang penting dilihat adalah akses perempuan pada informasi dan keterampilan tentang EBT. Dari pengalaman di lapangan banyak perempuan khususnya anggota Koalisi Perempuan Indonesia masih belum mengetahui apa itu EBT dan tidak mengenali sumber-sumber disekitarnya. Koalisi Perempuan Indonesia melakukan sosialisasi, diskusi dan mengajak anggota untuk melakukan pemetaan potensi di sekitarnya. Hasil pemetaan ini cukup menggembirakan karena banyak sekali potensi yang selama ini tidak diperhitungkan seperti minyak jelantah atau minyak goreng bekas memasak. Minyak jelantah bisa digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak tanah atau kayu bakar yang selama ini digunakan. Peralatannya pun tidak harus khusus melainkan dapat menggunakan kompor minyak yang biasanya digunakan untuk minyak tanah.

Kedua bagaimana partisipasi perempuan dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, dalam hal ini kebijakan bidang energi dan khususnya EBT. Inisiatif-inisiatif kelompok perempuan untuk pengembangan EBT seharusnya menjadi salah satu topic dalam proses musyawarah pembangunan mulai dari tingkat dusun dan desa. Potensi yang ada di perdesaan juga dapat dikembangkan menjadi badan usaha milik desa (BUMDes). Ketiga mengkaji manfaat pembangunan bidang energi dan pengembangan EBT. Apakah hasilnya bermanfaat bagi perempuan dan kelompok rentan lainnya, bagaimana tingkat kemanfaatannya? Apakah pengembangan EBT ini akan mengurangi ketidakadilan berbasis gender yang banyak dialami oleh perempuan? Misalnya ketika desa memanfaatkan air terjun untuk sumber listrik desa sehingga jalanan di desa pada malam hari menjadi lebih terang. Apakah ketika perempuan melakukan perjalanan malam hari menjadi lebih aman dari tindak kriminal? Karena desa memiliki sumber listrik sendiri dan tidak tergantung pada PLN maka listrik di desa tersebut terjamin nyalanya. Perempuan yang memiliki usaha rumahan menjadi lebih lancar dan meningkat ekonomi keluarganya. Apakah dengan kemudian hal ini bisa mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang sebelumnya mungkin sering terjadi?

Keempat, bagaimana perempuan ikut mengontrol implementasi kebijakan tersebut? Saat ini selain terdapat sejumlah peraturan tentang energi di tingkat

pusat, pemerintah juga telah menyusun kebijakan energi nasional (KEN) dan rencana umum energi nasional (RUEN). Rencana tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional dan telah dilakukan harmonisasi dengan indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya tujuan ke-7 tentang energi. Khusus untuk EBT, DPR RI juga telah membahas rancangan undang-undang tentang EBT (RUU EBT) yang belum disahkan pada periode lalu sehingga menjadi pekerjaan rumah periode saat ini. Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi perempuan merasa penting untuk ikut serta atau terlibat aktif dalam proses-proses ini. Baik implementasi kebijakan yang telah ada maupun proses pembahasan RUU EBT. Di tingkat daerah, terdapat daerah yang telah menyusun rencana umum energi daerah (RUED), salah satunya provinsi Jawa Tengah. Mereka juga telah memasukkan rencana pembangunan bidang energi ke dalam RPJMD, melakukan harmonisasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan nawa cita yang diusung presiden Joko Widodo pada periode lalu. Seluruh implementasi kebijakan ini penting untuk diawasi oleh perempuan sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan.

Saat ini Koalisi Perempuan Indonesia tengah menyusun kertas posisi tentang perempuan dan EBT yang akan digunakan sebagai bahan menyusun policy brief, sehingga dalam waktu dekat dapat melakukan lobby dan audiensi dengan Komisi 7 DPR RI dan Kementerian/Lembaga terkait. Kertas posisi ini juga disusun dengan masukan dari NGO yang telah lebih dulu concern pada isu EBT seperti IESR, Rumah Energi, IBEKA dan juga ada masukan dari LIPI. Di sisi penguatan hak perempuan sebagai konsumen, YLKI menjadi narasumber untuk penguatan di balai-balai perempuan dan memberi masukan pada kertas posisi. Harapan ke depan EBT bukan hanya wacana atau rencana di atas kertas saja, tetapi diwujudkan dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat bukan hanya secara ekonomi tetapi juga pengurangan kekerasan berbasis gender. Ketimpangan gender yang banyak dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya tetap menjadi arus utama bagi Koalisi Perempuan Indonesia dalam melakukan advokasi kebijakan, pengorganisasian maupun penguatan jaringan di isu EBT ini. Semoga terwujud.

Oleh **Sutriyatmi**

Deputi Sekretaris Jendral Bidang Program Koalisi Perempuan Indonesia

ADAKAH ENERGI BERSIH DAN INKLUSIF UNTUK PEREMPUAN?

Ketersediaan energi merupakan elemen penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia serta merupakan kebutuhan mutlak untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan. Bagi perempuan ketersediaan energi sangat berpengaruh pada kesehatan reproduksi, proses produksi rumah tangga, rasa keamanan individu, dan terkait pada tingkat kesejahteraan perempuan.

Energi listrik bagi perempuan membantu mempermudah aktifitas rumah tangga mulai dari menghidupkan pompa air untuk mempermudah ketersediaan air hingga membantu meringankan pekerjaan rumah tangga karena listrik merupakan sumber tenaga untuk menghidupkan alat elektronik yang membantu kegiatan memasak di dapur. Lilis anggota Koalisi Perempuan Indonesia dari Balai Perempuan Kluting Jaya, Halmahera Tengah, Maluku Utara berbagi pengalamannya sebagai konsumen energi, “walau belum terang benderang pada awal tahun 2000 sudah ada aliran listrik, listrik berguna untuk memompa air dari sungai, sehingga saya tak harus menimba air dari sumur.”

Sayangnya, konflik antar agama terjadi dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat Kluting Jaya yang merupakan transmigran asal Pulau Jawa. Saat terjadi kerusuhan, pipa air dan kawat sambungan dijadikan sebagai senjata rakitan dan wayer panah, sejak itu aliran air ke rumah-rumah terhenti. Lilis bercerita bahwa dulu dia sempat menggunakan tungku kayu bakar untuk memasak karena kayu bakar sangat mudah diperoleh oleh suaminya ketika membersihkan lahan. Namun sejak 2005 Lilis telah menggunakan penanak nasi otomatis (rice cooker) karena aliran listrik telah tersedia di Kluting Jaya.



Bagi Lilis energi listrik tak sepenuhnya dapat diandalkan untuk menunjang pekerjaan rumah tangga yang harus dilakukannya, “hingga sekarang, listrik kadang semalam menyala, kadang tidak karena aliran listrik ini bergiliran sesuai SP (Satuan Pemukiman), jika dirata-rata aliran listrik tersedia hanya 6 jam per hari. Lilis menjelaskan bahwa tagihan penggunaan listrik yang dia bayarkan perbulan berkisar antara Rp15.000 hingga Rp70.000. Aliran listrik yang tak stabil ini juga membuat peralatan dapur cepat rusak,” ungkap Lilis kecewa.

Jika listrik padam maka penerangan di rumahnya akan menggunakan mesin diesel dan dibutuhkan solar sebagai sumber energi penerangan. Lilis harus membeli minimal 3 liter solar untuk menerangi rumahnya dalam semalam.

Mari kita hitung pengeluaran Lilis jika listrik tak menjadi sumber energi di rumahnya!

Mari Berhitung

Semalam tanpa listrik
3 liter x Rp9.000 = Rp 27.000

Sebulan tanpa listrik
30 hari x Rp 27.000 =
RP810.000

Tanpa aliran listrik setengah dari pendapatan Lilis telah terpakai untuk membeli solar, Bagaimana dengan biaya sandang, pangan, dan pendidikan anaknya?

Lilis harus mengeluarkan setengah dari pendapatannya untuk membeli bahan bakar minyak, bagaimana dengan biaya sandang, pangan, dan pendidikan anaknya? Ketidaktersediaan listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah tentu dapat dikatakan sebagai pelanggaran kemiskinan.

Dengan adanya **Strategic Partnership untuk energi bersih dan inklusif**, Lilis berharap partisipasi dan pengendalian energi listrik dapat meningkat, misalnya penyedia energi listrik memberikan kejelasan tentang standar minimum pelayanan sehingga konsumen tak merasa dirugikan. Tak hanya itu, Lilis juga berharap energi listrik dapat menyala siang dan malam untuk membantu menggerakkan roda perekonomian di rumah tangga, “pada siang hari ibu-ibu rumah tangga bisa membuat kue dengan peralatan listrik sehingga tidak lagi menggunakan tangan.”

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil terutama minyak bumi menimbulkan kekhawatiran mengingat energi tersebut bukan energi yang terbarukan. Potensi energi terbarukan seperti biomasa, panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup besar. Hanya saja sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat terbatas. Lilis menyatakan bahwa ada potensi energi terbarukan di sekitarnya yaitu air terjun, “menurut saya air terjun di satuan pemukiman 2B, Desa Summersari dapat menjadi sumber pembangkit listrik, irigasi lahan, hingga air minum bersih.”

BERBEDA PULAU, SAMA NASIB



Senin mungkin adalah hari menuju kegelapan bagi Ade Kasim, anggota Koalisi Perempuan Indonesia kelompok kepentingan petani asal Kelurahan Gambesi, Ternate Selatan. Nyatanya hampir setiap Senin subuh, ketika dia dan anak-anaknya bersiap untuk pergi ke sekolah aliran listrik akan padam. “Pengaruhnya kepada anak-anak saya, mereka bangun jam 5 subuh untuk belajar dan biasanya subuh itu saya menyetrika seragam mereka,” ujar Ade.

Keluarga Ade juga masih bergantung kepada energi fosil seperti minyak tanah untuk memasak. Setiap bulannya Ade membutuhkan minyak tanah sekitar 30 liter. “Subsidi minyak tanah yang harganya Rp3.800 yang diberikan pemerintah maksimal 25 liter/ keluarga, jika kurang saya harus membeli minyak tanah dengan harga Rp5000-Rp6000/ liternya,” ceritanya.

Terkadang Ade lebih memilih menggunakan kayu bakar untuk memasak karena mudah dia kumpulkan serta pasokan minyak tanah yang tak tentu keberadaannya. Ketika ditanya mengenai penggunaan kompor gas, Ade berkata bahwa dia masih takut untuk menggunakan kompor gas, “sudah ada kompor gasnya namun belum ada sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat masih takut menggunakan gas untuk memasak.”

Dari pengalaman Lilis dan Ade terlihat bahwa pengetahuan perempuan terkait energi bersih dan terbarukan masih sangat minim, perempuan merupakan konsumen energi utama dalam rumah tangga, tetapi pengetahuan akan adanya efek negatif dari konsumsi energi fosil yang terus menerus belum mereka ketahui. Sudah saatnya perempuan mengetahui sumber energi bersih dan terbarukan yang dapat mereka konsumsi. Perempuan perlu dilibatkan sebagai konsumen untuk energi bersih dan terbarukan karena jika dunia hanya terus membangun tanpa melihat konsekuensi dikemudian hari maka tak akan ada kehidupan yang berkelanjutan untuk semua umat manusia.-**Gabrella Sabrina**

PEREMPUAN DAPAT BERPERAN SENTRAL DALAM MEMPERLUAS AKSES ENERGI

Asia mengalami urbanisasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan lebih cepat daripada wilayah lainnya. Asia telah menjadi rumah bagi setengah populasi perkotaan global, dan ini menimbulkan banyak masalah sulit serta akan bertambah seiring berjalannya waktu. Polusi udara, kemacetan, emisi CO₂, perampasan air dan sanitasi dasar, dan kerentanan terhadap bencana alam sudah pasti menjadi masalah. Perkembangan infrastruktur tidak sejalan dengan urbanisasi, dan sebagian besar penduduk kekurangan akses terhadap energi dan sangat bergantung pada tradisi bahan bakar. Masalah ini akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam ACEF (*Asia Clean Energy Forum*) Manila, Philipina 5-8 Juni 2017.

Salah satu dari banyak konsekuensi negatifnya adalah polusi dalam ruangan. Pada tahun 2012 sebanyak 4,3 juta orang yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak, meninggal prematur akibat polusi udara dalam ruangan yang disebabkan oleh penggunaan biomassa. Delapan dari 10 kematian ini terjadi di wilayah Asia Pasifik. Jelas tragis, ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga yang terkena dampak serta merupakan beban besar bagi masyarakat dan ekonomi. Di atas segalanya, isu-isu ini secara langsung mempengaruhi orang-orang yang pindah dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan dan, di lingkungan baru mereka, tidak memiliki sistem pendukung yang sebelumnya dapat mereka andalkan. Ini hanyalah beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh energi urban.

MENGAPA PERSPEKTIF GENDER PENTING UNTUK MEMPERLUAS AKSES TERHADAP ENERGI BERSIH?

Perempuan adalah penyedia utama energi rumah tangga dan secara tidak proposional terpengaruh oleh kekurangan energi. Sayangnya, pemangku kepentingan cenderung mengabaikan perempuan

dalam program inisiatif energi. Hal ini juga tak terlepas dari kenyataan bahwa mayoritas orang miskin di dunia adalah perempuan, maka perempuan tidak bisa terus tertinggal dalam usaha mengurangi kemiskinan.

Keterkaitan gender, energi, dan kemiskinan berawal dari perbedaan laki-laki dan perempuan dalam kebutuhan energi dan tingkat akses mereka. Untuk memastikan hasil pembangunan yang adil, perbedaan ini harus dipertanggungjawabkan saat mengembangkan intervensi energi. Ketika perempuan mendapatkan akses terhadap layanan energi yang berkualitas maka akan berdampak kepada pengurangan kemiskinan, mulai dari kesehatan, pendapatan, dan keluarga. Fakta penting lainnya, perempuan dapat berperan sentral dalam memperluas akses energi, yang kenyataannya merupakan suatu tantangan terbesar saat melaksanakan Energi Berkelanjutan untuk Semua (*Sustainable Energy for All*).

AKSES ENERGI BERKUALITAS MEMBERI BANYAK DAMPAK DALAM PENGURANGAN KEMISKINAN

Kebijakan energi akan sangat mempengaruhi kehidupan perempuan, ini berarti pemerintah baik nasional dan daerah harus memperhatikan setiap kebijakan yang mereka buat dan laksanakan. Pertama, mereka harus menunjukkan komitmen dan pengakuan bahwa isu ini penting dan harus memperlakukan isu energi bersih sangat terkait dengan Hak Asasi Manusia yang melingkupi hak hidup dan hak-hak dasar lainnya. Kedua, sama seperti sektor lainnya pemerintah memiliki peran besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung di sektor energi, dengan cara menggabungkan kekuatan aktor besar dan kecil serta memberi ruang kepada semua orang untuk berpartisipasi. Aktor kecil sangat penting saat kita membicarakan perluasan akses dimana biaya transaksi terlalu tinggi untuk aktor besar (distributor dan produsen). Kita membutuhkan administrasi dan peraturan perpajakan yang mendukung perusahaan sektor informal yang lebih kecil, instrumen pembiayaan yang sesuai untuk perempuan dan pengusaha kecil.

Berikutnya, pemerintah harus mendukung deklarasi mengenai masalah pendanaan. Apalagi ketika membicarakan mengenai intervensi di daerah pedalaman atau terpencil, peran proaktif pemerintah dalam pembiayaan sangat penting. Akhirnya, pemerintah memiliki peran besar dalam kontrol kualitas. Saat harga energi terbarukan menurun, memiliki serangkaian konsekuensi positif, namun juga membawa beberapa masalah kualitas yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan baik. Kita bisa memikirkan skema sertifikasi sebagai salah satu contoh, tapi masih ada cara lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam hal ini.

PENDEKATAN BARU UNTUK ENERGI BERSIH DAN INKLUSIF

Suara dari akar rumput penting didengarkan dan diakomodir karena suara-suara ini berasal dari tempat di mana tantangan energi terbesar berada dan dapat menunjukkan solusi praktis untuk menjangkau masyarakat yang sebagian besar miskin dan sulit dijangkau dengan layanan energi. Orang-orang ini berjuang keras untuk membawa akses energi ke daerah-daerah dimana infrastruktur berskala besar tidak mungkin diperluas. Masyarakat secara umum perlu dorongan bersama untuk menyadari bahwa isu energi adalah masalah bersama, diskusi-diskusi perlu diadakan untuk mencari solusi bersama.

Saat ini Koalisi Perempuan Indonesia tergabung dengan *Strategic Partnership for Green and Inclusive Energy*. Dalam program ini, Koalisi Perempuan Indonesia memilih Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara sebagai lokasi pelaksanaan program. Pemilihan Kabupaten Halmahera Tengah antara lain karena mempertimbangkan, kesesuaian wilayah dengan strategi nasional untuk energi baru terbarukan pemerintah, krisis energi yang dialaminya, serta peran strategis perempuan. Data dari Global Tracking Framework menunjukkan bahwa akses elektrifikasi di Indonesia mencapai 97%, dengan akses memasak dengan energi bersih mencapai 57% dan penggunaan energi terbarukan mencapai 38%.

Di tingkat nasional, kebijakan untuk pengembangan energi baru terbarukan telah dimulai secara formal sejak tahun 2014 dengan lahirnya dua peraturan penting yang mengatur tentang Energi Baru dan

Terbarukan yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional dan Perpres No 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN yang di dalamnya mengatur tentang Kebijakan Energi Baru dan Terbarukan (EBT).

Kedua peraturan tentang EBT merupakan peluang untuk meningkatkan akses masyarakat, khususnya masyarakat miskin terhadap energi. Sayangnya, kedua peraturan tersebut belum mengatur tentang partisipasi masyarakat pada umumnya dan khususnya partisipasi perempuan.

Provinsi Maluku Utara sangatlah mungkin memenuhi kebutuhan pengembangan EBT, karena memiliki keberagaman sumber-sumber energi terbarukan. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 5899 K/20/MEM/2016 tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara tahun 2016 – 2025 telah mengidentifikasi tersedianya sumber-sumber daya energi terbarukan yaitu panas bumi dan air di Maluku Utara. Selain itu, pemerintah masih mungkin menggunakan sumber daya matahari dan angin yang melimpah.

Dengan sumber daya yang melimpah tersebut, sangatlah ironis bila pada kenyataannya bahwa saat ini Maluku Utara mengalami krisis listrik. Bappenas (2015) mengidentifikasi Maluku sebagai salah satu wilayah dengan pemanfaatan energi terendah. Pada tahun 2015 rasio elektrifikasi di Provinsi Maluku Utara adalah 70,79 persen, jauh di bawah rata-rata nasional pada tahun 2014 (81,70 persen). Sebagian masyarakat mencoba memenuhi sendiri kebutuhan listrik dengan genset bermesin diesel untuk menyediakan pasokan listrik. Salah satu penyebab krisis listrik di Maluku Utara adalah ketidakterediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menyalurkan energi, serta minimnya pengembangan energi-energi terbarukan.

Hal ini sejalan dengan pengalaman perempuan-perempuan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Halmahera Tengah yang menyampaikan bahwa di desanya belum ada listrik. Salah satu desa telah mendapatkan akses listrik tetapi hanya tersedia mulai pukul 18.00 hingga 06.00 keesokan harinya. Perempuan juga merasa belum dilibatkan dalam pembangunan di sektor energi.

Perempuan-perempuan di Kabupaten Halmahera Tengah, masih di posisikan sebagai konsumen dari energi terbarukan. Perempuan masih menjadi pihak yang terpinggirkan dari perencanaan, pengelolaan, pengambilan keputusan, serta pemantauan pembangunan energi terbarukan. Padahal perempuan memiliki peran strategis dalam menyediakan sumber daya alam untuk mengembangkan energi terbarukan.

Untuk itu, Koalisi Perempuan Indonesia akan mendorong pemenuhan kebutuhan dan akses energi masyarakat Indonesia terpenuhi dari sistem energi bersih serta inklusif secara sosial dan gender yang menciptakan peluang ekonomi dan berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara.

***Gabrella Sabrina**

*Sebagian tulisan disadur dari
energia.org dan gtf.esmap.org*





PEREMPUAN DAN ENERGI LAPORAN DARI HALMAHERA, PULAU SERIBU, DAN JAWA TENGAH

Foto: (ANTARA FOTO/REUTERS/CARLOS JASSO)

Pemadaman listrik yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2019 meliputi Jakarta dan hampir di sebagian Jawa. Hal ini terjadi akibat dari gangguan sisi transmisi ungaran dan pemalang, Jawa Tengah 500 KV. Pemadaman terjadi sekitar pukul 11.58 Wib dan berangsur pulih antara pukul 18.00 hingga pukul 24.00 wib. Pemadam terjadi di wilayah Banten (Cilegon, Lebak, Rangkasbitung, Serang, tangerang dan Tangerang Selatan), Jawa Barat (Bandung , Bekasi, Bogor, Cianjur, Cimahi, Cirebon, Depok, Garut, Gunung Putri, Karawang, Majalaya, Purwakarta, sumedang, tasikmalaya dan Sukabumi), Jawa Tengah dan DIY (Brebes, Cilacap, Demak, Klaten, Kudus, Magelang, Pekalongan, Purwokerto, Salatiga, sukoharjo, Surakarta, Semarang, Tegal dan Yogyakarta).

Listrik merupakan energi yang telah menjadi kebutuhan primer bagi manusia. Listrik banyak digunakan untuk keperluan pekerjaan baik di kantor, perdagangan, restoran, rumah maupun kegiatan lainnya. Terjadinya pemadaman akan sangat berdampak bagi rutinitas pengguna listrik, yaitu masyarakat. Dampak yang dirasakan apabila terjadi pemadaman listrik bagi masyarakat antara lain : terbengkalainya pekerjaan rumah, meningkatnya risiko tindakan kriminalitas, terkendalanya pelayanan masyarakat, terlambatnya laju informasi dan pengeluaran tak terduga.

Terkait dengan energi ini, Koalisi Perempuan Indonesia bekerjasama dalam program *Strategic Partnership Green and Inclusive Energy* (SP energi) maka pada awal program di tahun 2018 dan telah melakukan riset aksi terkait kesetaraan Gender dan Energi terbarukan sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pelayanan umum bagi setiap warganegara terutama perempuan. Hak bagi setiap orang untuk memperoleh energi dijamin oleh Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, yakni pada pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa: setiap orang berhak memperoleh energi.

Perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan dan kebutuhan yang berbeda terhadap energi, karena perbedaan peran, kedudukan dan sifat yang dilekatkan oleh masyarakat kepada mereka. Akses terhadap energi bagi perempuan akan berkontribusi dalam mengurangi beban kerja perempuan untuk melakukan kerja-kerja di ranah domestik maupun kerja-kerja di ranah publik. Pengurangan beban kerja juga akan berkontribusi pada peningkatan derajat kesehatan perempuan, karena perempuan tidak harus mengangkat beban berat dan memiliki kesempatan istirahat lebih banyak. Akses terhadap energi bagi perempuan juga berkontribusi untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perempuan, karena tempat yang terang akan meminimalisir kesalahan kerja dan

ancaman kejahatan. Lebih dari itu, akses terhadap energi bagi perempuan akan memberikan dampak pada meningkatnya kesempatan perempuan untuk mengembangkan pengetahuan dan melakukan usaha di bidang ekonomi.

Pada tahun 2014, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kebijakan energi nasional yakni Peraturan Pemerintah no 7 tahun 2014. Di dalam kebijakan ini, pemerintah menargetkan prosentase pemanfaatan energi terbarukan dalam bauran energi nasional minimal sebesar 23% pada 2025. Isu energi terbarukan merupakan isu baru yang masih belum menjadi pembahasan gerakan perempuan. Untuk itu, perempuan perlu memperoleh peningkatan pengetahuan dan kecakapan dalam membangun gerakan perempuan untuk menyuarakan isu kesetaraan gender & energi terbarukan.

Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan riset di 2 provinsi dan 1 cabang, yaitu provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kabupaten Halmahera Tengah dan Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Sedangkan riset di area cabang dilakukan di cabang pulau seribu. Riset yang dilakukan di kabupaten Halmahera Tengah dilakukan pada tahun 2017 sedangkan di kota salatiga, Kabupaten Semarang dan pulau seribu dilakukan pada tahun 2018.

1. KABUPATEN HALMAHERA TENGAH – PROVINSI MALUKU UTARA



Secara administrasi Provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 wilayah kabupaten dan 2 kota, yaitu Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Kepulauan Sula, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Ternate dan Tidore Kepulauan. Pulau Halmahera merupakan pulau raksasa yang tidur karena luas wilayahnya namun sarana dan prasarana masih kurang memadai. Kabupaten Halmahera Tengah beribukota di Weda. Masyarakat Halmahera tengah lebih banyak sebagai Petani dan Nelayan, selain bekerja sebagai pegawai. Bagi Petani dan Nelayan sangat mengandalkan alam dalam memenuhi kebutuhannya. Weda merupakan jantung perekonomian bagi masyarakat Halmahera Tengah, karena semua aktifitas ekonomi berlangsung dari Weda. Namun pada kesehariannya masyarakat Weda kesulitan mengakses air bersih karena sumur bor umumnya keruh dan asin, sedangkan air PDAM sering mati. Selain air maka masyarakat juga kesulitan akses listrik selama 24 jam penuh karena tiap hari selalu ada jadwal mati lampu, ini merupakan jadwal rutin, namun ada kalanya mati mendadak.

Desa di Halmahera tengah terdiri dari 61 desa/kelurahan namun tidak terdapat desa adat. Masing-masing desa memiliki karakteristiknya sendiri. Penelitian ini berada di empat desa yaitu di Desa Fidi Jaya, Desa Were, Desa Nurweda dan Desa Kluting Jaya.

A. Desa Fidi Jaya, kabupaten Halmahera Tengah, Prop Maluku Utara

Desa Fidi Jaya merupakan desa di sebelah utara kota kecamatan Weda dengan kondisi alam pesisir dengan suhu rata-rata 32 celcius, mata pencaharian umum di desa adalah nelayan, pedagang dan petani. Permasalahan yang dialami oleh penduduk Desa Fidi Jaya terkait dengan listrik adalah pemadaman listrik setiap hari mulai pukul 16.00-18.00, diluar pukul itu ada kalanya listrik juga mati misalnya pada pukul 08.00 pagi maupun pada malam hari. hal ini menimbulkan permasalahan lain seperti banyak alat elektroniknya yang rusak karena naik turun tegangan listrik. Sedangkan Perempuan di Fidi Jaya banyak bekerja di sektor informal seperti menjual gorengan, membuat roti, laundry, usaha kos, usaha makanan dan ibu rumah tangga, sehingga

pemadaman listrik juga mengganggu perputaran perekonomian bagi perempuan di Desa Fidi Jaya.

Hal lain yang menjadi perhatian terkait energi untuk memasak adalah penggunaan kayu bakar. Untuk memasak, para Ibu di Desa Fidi Jaya umumnya masih menggunakan kayu bakar (Bakau) dan minyak tanah untuk memasak. Kayu bakar didapat dengan cara menebang hutan bakau disekitar desa, hal ini tentu akan berdampak pada ekosistem hutan bakau karena tidak terdapat pola penanaman kembali setelah pemotongan tersebut. Selain itu, kelangkaan minyak tanah sering terjadi karena umumnya minyak tanah dari depot telah diambil pedagang eceran untuk stok penjualan mereka. Harga minyak tanah di depot berkisar Rp. 5.500/liter, sementara jika warga membeli dari pedagang eceran harga sudah Rp. 8.000/liter. Distribusi solar dan bensin amat terpengaruh cuaca serta datang stok dari agen, para nelayan membeli solar di pom Pertamina di desa Nurweda dan pom mini di desa Were. Ini karena lebih murah 7.500 premium dan solar 7.500, jika dijual di eceran 9.000 dan 10.000.

Hal lain yang dihadapi warga Desa Fidi Jaya adalah air bersih karena umumnya menggunakan sumur yang airnya terasa asin, serta sulit menghilangkan busa ketika mencuci pakaian atau alat rumahtangga. Air yang disediakan oleh PDAM sering mati sehingga warga kadang lebih memilih mengambil air di masjid dan menyewa tukang ojek untuk mengangkut airnya. Sebagian warga lainnya memutuskan membeli air galon seharga Rp. 5.000/galon untuk air bersih.

B. Desa Nurweda, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara

Desa Nurweda adalah bagian dari desa Weda yang dipimpin oleh kepala desa. Jumlah orang yang bekerja sebagai pegawai merupakan jumlah terbesar, namun rata-rata adalah pendatang bukan penduduk asli Nurweda. Disusul penduduk yang bekerja sebagai petani dan nelayan.

Masalah pemadaman listrik sering terjadi, hal yang sama dengan Desa Fidi Jaya dimana aliran listrik mati secara rutin tiap hari mulai pukul 16.00 hingga 18.00. Ada kalanya listrik juga padam diluar jadwal rutin tadi, bisa pagi hari, siang hari atau dini hari,

tanpa bisa diprediksi. Listrik yang mati mendadak diluar jam rutin pukul 16.00-18.00 WIT tadi jika ditotal mencapai antara 4-7 jam. Pada Sabtu dan Minggu pemadaman listrik lebih sering terjadi. Selain listrik yang sering mati ternyata pasokan air bersih dari PDAM juga sering tidak mengalir.

Untuk memasak para ibu umumnya menggunakan kompor dengan minyak tanah yang harga ecerannya berkisar dari Rp. 6.500-7.000/liter. BBM mudah di dapatkan karena terdapat satu pom pertamina mini yang melayani eceran dan grosiran. Selain krisis listrik karena pasokan listrik sering mati, kristis air bersih, serta kekurangan minyak tanah maka kondisi perempuan di Nurweda juga memprihatinkan karena kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi. Di pemukiman yang padat sangat mudah tetangga mendapati suami istri baku hantam setiap hari. Kekerasan tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Polisi karena dianggap hal biasa

C. Desa Kluting Jaya, Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara

Desa Kluting Jaya merupakan desa tujuan transmigrasi. Mata pencaharian penduduk kluting jaya adalah petani, pedagang dan pegawai. Hasil pertaniannya berupa padi, sayuranan dan buah-buahan telah menyebar ke seluruh Maluku dan Papua Barat. Di Kluting Jaya aliran listrik hanya bisa dinikmati 12 jam yakni pada malam hari hingga pagi hari atau pukul 18.00 hingga 06.00 WIT. Jadwal ini merupakan jadwal resmi namun sering terjadi listrik hanya ada mulai pukul 18.00 hingga 24.00 WIT saja. Kondisi ini membuat warga hanya bisa mengakses layanan listrik sehari paling empat jam saja, dengan kondisi yang tidak stabil, sering naik turun tegangannya.

Pada awal april 2017 tidak ada pasokan listrik selama 3 hari lamanya. Kondisi yang demikian menyebabkan kerusakan pada alat elektronik warga. Hal ini sangat mengganggu perputaran roda perekonomian masyarakat, banyak warga kemudian memilih diesel maupun genset untuk mendapatkan pasokan listrik agar kegiatan produksi tetap berjalan. Ini berarti ada tambahan biaya untuk solar atau bensin yang diperlukan untuk mengaktifkan diesel maupun genset.

Umumnya para Ibu di Kluting Jaya menggunakan kompor dan kayu bakar untuk memasak. Bahan bakar minyak tanah untuk kompor didapat melalui depo di rumah Kepala Desa dengan harga subsidi Rp. 5.500/liter. Kayu bakar untuk tungku diambil dari hutan sekitar desa. Secara umum warga sudah beralih ke kompor dengan minyak tanah namun jika minyak tanah pasokannya berkurang maka warga menggunakan kayu bakar.

2. PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. Kota Salatiga

Kota Salatiga terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang. Penggunaan Lahan Secara administratif Kota Salatiga terbagi menjadi 4 kecamatan dan 24 kelurahan. Kelurahan yang menjadi area riset adalah Kelurahan Blotongan-kecamatan Sidorejo, kelurahan Noborejo – Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Kutowinangun Lor – Kecamatan Tingkir dan kelurahan Mangunsari – Kecamatan Sidomukti. Berbeda dengan riset yang dilakukan di kabupaten Halmahera Tengah dimana energi listrik menjadi fokus dalam riset ini. Fokus riset di provinsi Jawa Tengah adalah energi apakah yang digunakan untuk memasak. Gas menjadi energi yang utama sebagai energi untuk memasak, meskipun tungku kayu bakar atau pawon masih digunakan sebagai energi pendamping untuk memasak.

A. Kelurahan Blotongan

Di kelurahan Blotongan, energi yang digunakan untuk memasak adalah kompor gas dengan tabung ukuran 3 Kg. Tungku atau pawon dengan kayu bakar masih digunakan juga meskipun hanya untuk memasak air minum saja. Gas mudah diperoleh dengan membeli di warung atau toko sekitar dengan harga sekitar Rp.20.000/tabung, kecuali ketika gas sulit didapat harga gas dapat mencapai Rp. 25.000/tabung. Jika menggunakan tungku atau pawon, kayu bakar dapat diperoleh disekitar rumah. Jika harus membeli kayu bakar cukup mahal karena untuk pembelian sebanyak 1 colt (pick up) harganya mencapai Rp. 400.000,- yang bisa digunakan selama 2 bulan. Sedangkan memasak menggunakan tabung gas sebanyak 3-4 tabung setiap bulannya. Dampak penggunaan gas

adalah rasa khawatir jika tabung gas akan meledak. Sedangkan keuntungan menggunakan gas untuk memasak adalah tidak membuat perkakas hitam dan tidak adanya asap dalam dapur. Meskipun hanya sedikit penduduk yang memiliki sapi untuk ditenakan tetapi pelatihan energi bersih terkait biogas telah dilakukan di kelurahan ini yang dilakukan oleh Qorriyah Toyyibah. Kelompok tani menjadi subjek dalam pelatihan energi bersih ini karena para petani memiliki sumber dayanya, yaitu ternak. Kendala dalam kelanjutan pelaksanaan program ini adalah modal awal yang cukup besar untuk membuat penampungan kotoran ternak awal. Sehingga cukup sulit dilaksanakan oleh penduduk.

B. Kelurahan Kutowinangun Lor

Sama hal dengan kelurahan Blotongan, energi untuk memasak yang digunakan adalah kompor gas dengan tabung ukuran 3 kg. Tungku kayu bakar atau pawon juga digunakan hanya untuk memasak air minum, air untuk mandi dan menanak nasi saja. Gas dapat diperoleh dengan membeli seharga Rp. 17.000,-/tabung. Penggunaan tabung gas dalam sebulan sebanyak 2-3 tabung. Kayu bakar sulit diperoleh jika musim hujan maka penggunaan gas bisa sebanyak 4 tabung dalam sebulan. Kayu bakar dapat dicari di kebun, sisa bangunan milik tetangga maupun sisa hasil tebangan pohon. Dampak dari penggunaan kompor gas adalah kekhawatiran gas akan meledak. Sedangkan dampak dari penggunaan tungku atau pawon dengan kayu bakar adalah asap yang menyebabkan mata perih, dinding dan perkakas menjadi hitam. Tetapi bagi yang memiliki dapur dengan ventilasi yang baik, asap tidak terlalu mengganggu.

C. Kelurahan Noborejo

Di Kelurahan ini masih menggunakan tungku kayu bakar atau pawon sebagai satu-satunya energi untuk memasak karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Kayu bakar diperoleh dengan mencari di kebun-kebun sekitar rumah atau membeli dengan harga Rp. 20.000/ikat. Biasanya kayu bakar dicari pada saat pulang bekerja atau pada saat libur dari bekerja. Selain kayu bakar, blarak (daun kelapa kering) juga dicari sebagai bahan bakar untuk memasak. Menggunakan kayu bakar untuk

memasak membuat mata perih karena asap dan perkakas dapur juga menghitam. Asap pun sering masuk hingga ke dalam rumah.

Ternak sapi menjadi sumber Energi Bersih dan Terbarukan karena kotorannya telah digunakan untuk biogas. Penduduk di Kelurahan Noborejo telah menggunakan biogas baik secara individu maupun komunal. Di kelurahan ini juga dilakukan Penyuluhan terkait Energi Bersih Terbarukan (EBT) yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota Salatiga.

D. Kelurahan Mangunsari

Sebagian penduduk Kelurahan Mangunsari menggunakan gas sebagai energi utama untuk memasak sehari-hari, tetapi jika gas sulit didapat maka yang akan digunakan adalah tungku atau pawon bahkan anglo. Sedangkan sebagian penduduk lainnya, menggunakan tungku atau pawon untuk memasak sehari-hari, sedangkan gas digunakan hanya untuk memasak air minum dan air untuk mandi saja.

Rata-rata penggunaan tabung gas dalam 1 bulan sebanyak 2-12 tabung setiap bulannya. Banyaknya menggunakan gas hingga 12 tabung karena digunakan untuk berjualan. Harga gas antara Rp. 17.000 – Rp. 19.000/tabung. Kayu bakar dapat diperoleh di kebun sekitar rumah atau dapat dibeli dengan harga Rp. 300.000/colt (pick up).

2.2. Kabupaten Semarang

A. Desa Regunung

Gas dan tungku atau pawon dengan kayu bakar masih digunakan sebagai energi untuk memasak. Sebagian penduduk menggunakan gas sebagai energi utama untuk kegiatan masak memasak, sedangkan tungku atau pawon dengan kayu bakar digunakan untuk memasak air saja sehingga penggunaan gas tidak boros. Sedangkan yang menggunakan tungku atau pawon sebagai energi utama untuk masak memasak terutama untuk berjualan, penggunaan gas untuk memasak hanya sebagai energi cadangan saja jika ada keperluan mendadak.

Setiap bulannya gas yang digunakan untuk memasak sebanyak 1-4 tabung gas. Menggunakan kayu bakar sebagai energi untuk memasak karena kayu bakar mudah diperoleh. Kayu bakar dapat

diperoleh di kebun sekitar rumah atau dari pabrik kayu. Selain itu juga dapat dibeli dengan harga Rp. 150.000,- /colt (pick up).

Desa Regunung ini pernah mendapat juara penghijauan (sumber udara bersih) yang diplotkan di Dusun Gumuk. Selain itu juga pernah mendapat penghargaan atas penanaman tanaman TOGA yang diplotkan di Dusun Karanggondang dan Ngaduman.

B. Desa Bener

Tungku kayu bakar atau pawon masih digunakan sebagai energi untuk memasak, sedangkan penggunaan gas hanya untuk keperluan mendesak saja. Tetapi ada juga yang hanya menggunakan gas sebagai energi untuk memasak. Dampak dari penggunaan gas

Jarang menggunakan gas karena keterbatasan ekonomi dan khawatir gas akan meledak selain itu karena kayu mudah didapat. Efek dari menggunakan kayu bakar adalah batuk akibat asap.

Tidak pernah mengetahui atau mendengar tentang Energi baru terbersihkan

Hamparan tanah yang luas baik persawahan maupun ladang dan didukung dengan hamparan sungai yang melintas di Desa Bener apabila dimaksimalkan akan mencukupi kebutuhan air untuk bercocok tanam, dikemudian hari akan ikut mensukseskan Swasembada Pangan yang dicanangkan Pemerintah Pusat.

3. PULAU PRAMUKA, KEPULAUAN SERIBU, DKI JAKARTA.



Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Terdapat 5 wilayah Kota Administratif dan 1 Kabupaten Administratif, luas keseluruhan mencapai 662,33 km², serta mempunyai 44 Kecamatan serta 267 Kelurahan. Sementara Kepulauan Seribu adalah satu-satunya Kabupaten administratif di Jakarta, dengan luas areal sekitar 8,70 km², terdiri dari 2 Kecamatan dan 6 Kelurahan. Jumlah penduduk di Kepulauan Seribu sekitar 23.616 Jiwa terdiri dari 11.834 Laki-laki dan 11.782 Perempuan.

Pulau Pramuka termasuk ke dalam wilayah kelurahan Pulau Panggang, kecamatan Kepulauan Seribu utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Pulau Pramuka merupakan pusat administrasi dan pemerintahan Kabupaten administratif Kepulauan Seribu. Kondisi pemukiman di pulau Pramuka cukup padat dengan rumah yang berdempet-dempet yang di atur seperti kavling. Sementara kondisi jalan dipasang konblok sampai ke wilayah paling dalam. Sebagian besar masyarakat di pulau Pramuka sudah tinggal di bangunan rumah permanen dengan penerangan listrik dari PLN yang menyala selama 24 jam. Hal ini karena sejak 5 tahun yang lalu sejak PLN telah membangun instalasi kabel bawah laut untuk menyalurkan listrik ke pulau pramuka.

Pulau Pramuka juga dijadikan sebagai pulau wisata yang ramai di kunjungi wisatawan terutama pada akhir pekan atau musim liburan. Memiliki homestay juga menjadi mata pencaharian utama bagi banyak warga pulau Pramuka. Kebanyakan warga yang memiliki lahan agak luas lebih memilih membangun homestay karena bisa menghasilkan uang dengan cepat dan cukup besar (harga sewa Rp 500.000/malam).

Lahan di Pulau Pramuka tidak cukup luas bahkan nyaris tidak ada lahan kosong, hampir tidak ada warga yang memiliki hewan ternak. Kebanyakan masyarakat Pulau Pramuka bekerja di sektor informal seperti menjadi nelayan dengan menangkap ikan di laut, menjadi pengusaha homestay dan menjadi pemandu wisata kebanyakan juga menjadi pengemudi ojek perahu dan bahkan hampir semua laki-laki.

Bagi orang-orang yang bekerja di laut jika angin kencang maka tidak bisa bekerja dan itu berarti juga pengiriman barang kebutuhan sehari-hari akan terhambat dan dampaknya adalah barang kebutuhan sehari-hari yang hilang di pasaran selama 1-2 hari. Perempuan umumnya menjadi pedagang keliling dan pengrajin kerupuk ikan. Sisanya berdagang kios, menjadi pegawai profesional misalnya menjadi petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), PNS dan guru yang jumlahnya cukup banyak.

Untuk memasak, hampir semua warga Pulau Pramuka memasak dengan menggunakan bahan bakar gas elpiji 3 Kg sejak di berlakukannya konvensi minyak tanah ke gas maka mau tidak mau masyarakat mengganti bahan bakar untuk memasak dengan gas elpiji karena sejak saat itu harga minyak tanah menjadi mahal. Sebelumnya masyarakat memasak dengan menggunakan minyak tanah dan ada juga yang memakai kayu bakar yang di ambil di hutan tapi seiring berjalannya waktu kayu bakar semakin sulit di dapat dan minyak tanah menjadi satu-satunya pilihan bahan bakar untuk memasak. Konvensi minyak tanah ke gas di lakukan tanpa bertanya apakah masyarakat siap dengan perubahan yang tiba-tiba tersebut dan dengan sosialisasi yang minim tentang cara pakai dan cara perawatan tabung gas membuat masyarakat masih memiliki ketakutan sampai sekarang tentang resiko meledaknya gas terutama untuk tabung gas 3 Kg.

Harga gas 3 Kg yang mahal dan tidak stabil juga menjadi salah satu yang di keluhkan oleh masyarakat terutama ibu-ibu, harga gas 3 Kg di Pulau Pramuka mencapai Rp 24.000 dan jika gas sedang langka maka harga naik menjadi Rp 25.000, penyebab kelangkaan gas 3 Kg di pasaran biasanya karena faktor cuaca. Hal ini disebabkan semua barang kebutuhan sehari-hari termasuk gas 3 Kg harus di kirim dari Kota dengan menggunakan kapal motor, jika angin sedang kencang maka pengiriman tidak bisa di lakukan. Hal itu menyebabkan gas menjadi langka dan harga gas di pasaranpun akan naik. Kondisi ini membuat warga berpikir seandainya saja Pertamina datang langsung ke pulau dan mendistribusikan langsung bahan bakar gas dan bahan bakar minyak mungkin harga gas bisa lebih murah atau ada bahan bakar alternatif lain. (dedew2019)

“RENCANA UMUM ENERGI DAERAH DALAM PENINGKATAN PERAN STRATEGIS PEREMPUAN UNTUK MENDORONG PEMERINTAH MEWUJUDKAN ENERGI HIJAU DAN INKLUSIF”

Oleh : Ria Yulianti



Koalisi Perempuan Indonesia telah mengadakan Dialog Publik pada tanggal 28 Maret di Semarang dengan hadirinya Kadis Dinas ESDM Jawa Tengah yakni Bapak Sujarwanto Dwiatmoko, dalam pidatonya menyampaikan bahwa “Energi menjadi bagian penting yang menjadi masalah global. Perang dingin terjadi karena energi, blok barat dan timur, berebut pengaruh soal energi fosil terkait Arab Spring (minyak dan oli) hingga ada perang dingin”. Beliau juga menambahkan bahwa “Semarang, sudah ada perpipaan sangat jumlahnya besar di Jawa Tengah, meskipun tidak terlalu bagus, namun potensinya besar. Batu bara jumlahnya cukup besar tapi tidak dapat diperbaharui. Mencari potensi migas itu biayanya mahal. Keterbelakangan pendidikan kita sehingga mempersulit melakukan penelitian terkait potensi energi lainnya. Terkait sel surya atau panel surya, Bappeda sudah ada atau sudah dipasang di berbagai instansi pemerintah dan ruang publik”.

Dalam pertemuan yang sama, Bibik Nurudduja selaku Presidium Nasional Kelompok Kepentingan Perempuan Nelayan dalam pembukaan

menyampaikan bahwa “Energi Bersih Terbarukan adalah harapan bagi semua, energi digunakan bagi semua. Apabila energi habis maka akan menjadi kekacauan bagi semua. Energi Bersih Terbarukan adalah energi yang tidak beresiko buruk bagi manusia”. Koalisi Perempuan Indonesia sangat mendukung adanya Energi Terbarukan yang ada di Indonesia, namun dalam artian Energi Terbarukan yang bersih dan aman untuk digunakan khususnya untuk perempuan, anak dan kelompok rentan.



Ruli selaku Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah yang ikut terlibat dalam assesment terkait kebutuhan perempuan akan energi di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang memaparkan bahwa terdapat 4 (empat) Desa di Kota Salatiga dan 2 (dua) Desa di Kabupaten Semarang yang menjadi fokus assesmentnya. Ada beberapa potensi sumber energi terbarukan yang ada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang seperti sungai, mata air, kotoran sapi (biogas), septitank komunal, serta bioetanol yang berasal dari tanaman. Dalam dialog publik tersebut Ruli juga menyampaikan beberapa rekomendasi terkait pengolahan energi yang ada Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Yakni:

1. Mendorong Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Lingkungan yang di dalamnya terdapat pengaturan tentang penggunaan Energi Bersih Terbarukan
2. Advokasi kebijakan tentang Energi Bersih Terbarukan di tingkat Desa, Kota, Kabupaten dan Provinsi
3. Mengintegrasikan Energi Bersih Terbarukan dengan pemberdayaan perempuan
4. Membangun Balai Perempuan Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi terkait Energi (PIPA Energi)
5. Kampanye bersama terkait Energi Bersih Terbarukan
6. Memberikan Edukasi terkait Energi Bersih Terbarukan kepada setiap lapisan masyarakat

Salah satu perwakilan dari Dinas ESDM Jawa Tengah dalam presentasinya menyampaikan bahwa “Kebutuhan energi sangat meningkat, sedangkan potensinya semakin berkurang karena digunakan terus-menerus. Sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengumpulkan sumber energi, sedangkan kesadaran masyarakat masih kurang”. Perwakilan Dinas ESDM Jawa Tengah juga menjelaskan UU No. 30 tahun 2007 tentang Energi, sedangkan Jawa Tengah adalah Provinsi Pertama yang memiliki Perda tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang di dalamnya berisi tentang kebijakan energi di daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, dengan adanya RUED diharapkan bauran energi dapat memenuhi kebutuhan akan asupan

energi khususnya di Jawa Tengah.

Walaupun energi di Jawa Tengah dinyatakan surplus, namun untuk menjamin akses terhadap energi, Pemerintah telah menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED), Pemerintah juga mengendalikan efisiensi terkait dengan energi melalui pengadaan lomba-lomba seperti Lomba Desa Hemat Energi, Lomba Desa Mandiri Energi, dimana dengan efisiensi tersebut diharapkan warga dapat memanfaatkan Energi Bersih Terbarukan. Berikut adalah beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh pihak Dinas ESDM terkait energi di Jawa Tengah, yaitu :

1. Mengembangkan energi alternatif;
2. Meningkatkan pemanfaatan energi alternatif;
3. Pengembangan listrik desa alternatif
4. Pengembangan desa mandiri energi;
5. Pelaksanaan lomba desa mandiri energi;
6. Meningkatkan inovasi terkait energi di wilayah sekitar.



Dalam sesi tanya jawab, Meidina selaku perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menambahkan bahwa frasa Inklusif, tidak hanya berbicara tentang perempuan sendiri tetapi bagaimana juga bisa melibatkan perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas, sehingga EBT dapat memenuhi kebutuhan pihak – pihak tersebut. Beliau juga merekomendasikan agar adanya edukasi dan kampanye melalui keluarga sehingga menjadi strategi yang penting untuk dilakukan.

Mananggapi hal tersebut, Ruli menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Koalisi Perempuan Indonesia di Wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang, yakni:

- a. Untuk tingkat Balai Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia telah mengadakan pertemuan rutin untuk menguatkan informasi di tingkat akar rumput (ibu-ibu), kemudian memberikan informasi kepada rekan lainnya seperti WKRI, Muslimat dll.
- b. Peningkatan Kapasitas Anggota Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah melalui Pelatihan GALS yang melibatkan perempuan dan laki-laki, untuk mengkaji pembagian peran yang dilakukan di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.
- c. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah juga melakukan kerjasama dengan HWDI, PPNI, IPPI, LBH APIK Semarang, serta jaringan dan media lainnya untuk membantu teman-teman dari kelompok rentan dan terpinggirkan.
- d. Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah juga melakukan kerjasama untuk mengintegrasikan gender dengan dinas PPPA di Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga.

- e. Untuk meningkatkan pemahaman anggota serta masyarakat luas terkait dengan “Konsumen Cerdas”, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah kerjasama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia.
- f. Pada tingkat Balai Perempuan, Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah saat ini telah membentuk BP PIPA Energi yang bertujuan untuk menjadi pusat informasi, pengaduan dan advokasi terkait energi di tingkat desa. Harapannya semua masyarakat desa dapat menggunakan BP PIPA Energi.

Dalam dialog publik tersebut, masyarakat yang hadir sangat antusias terkait dengan isu energi. Mereka yang belum menyadari akan banyaknya potensi-potensi disekitar yang dapat menjadi sumber Energi Bersih Terbarukan sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi bagi seluruh masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan adanya sinergi dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat Sipil guna mewujudkan energi hijau dan inklusif.



PENGALAMAN PESERTA MENGIKUTI PELATIHAN GALS YANG MELIBATKAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Pertemuan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2018, di Desa Regunung, kabupaten Semarang. Pertemuan di hari pertama hanya melibatkan perempuan saja, hal ini dilakukan untuk melihat pengetahuan peserta mengenai kesetaraan gender, identifikasi kebutuhan-kebutuhan organisasi, target atau impian organisasi untuk beberapa waktu kedepan. Dalam prosesnya tidak ditemukan kendala yang signifikan, karena peserta dapat mengikuti kegiatan dengan baik. Pada pelatihan ini peserta digali kemampuan menganalisa untuk masalah-masalah yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pekerjaan rumah tangga merupakan pekerjaan domestik yang seharusnya dapat dikerjakan oleh perempuan dan laki-laki namun dalam praktiknya perempuan lah yang diposisikan untuk mengerjakan kegiatan domestik rumah tangga seperti mencuci piring, membersihkan rumah dan sebagainya. Selain menganalisa masalah-masalah, pelatihan ini mengajak peserta untuk menemukan tantangan dan peluang atas masalah-masalah yang ada. Berdasar prosesnya, peluang lebih banyak ditemukan agar peserta tetap focus terhadap sesuatu positif yang dapat mendukung kerja-kerja mulai dari kehidupan rumah tangga, hubungan kerja dengan jaringan atau media, sampai dengan kerja-kerja organisasi.

Pertemuan yang kedua melibatkan laki-laki yang merupakan pasangan (suami/ayah/saudara laki-laki) dari peserta perempuan yang ikut pelatihan. Pada pertemuan kali ini peserta melihat adanya perbedaan apabila pelatihan melibatkan hanya perempuan saja dan pelatihan dengan melibatkan laki-laki. Peserta laki-laki lebih dominan menggambarkan permasalahan rumah tangga misalnya pengeluaran rumah tangga, kepemilikan asset rumah tangga, pengambilan keputusan. Pada sesi pertama metode yang digunakan adalah "Perjalanan Impian", sesi ini peserta diminta untuk menggambarkan hal-hal yang akan menjadi target 5 tahun ke depan dengan memasukkan 3 aspek

yakni individu, keluarga dan masyarakat. Hubungan 3 aspek tersebut sangat diperlukan karena dalam menentukan suatu impian harus melihat peluang dan tantangan dari masing-masing aspek. Pada metode ini peserta sudah dapat menentukan target dan kapan akan dimulai untuk mendapatkan hasil atau outcome target 5 tahun ke depan. Selain metode "Perjalanan Impian" digunakan juga metode "Pohon Keluarga Bahagia" metode ini merupakan metode yang sangat erat kaitannya dengan kesetaraan gender, masalah-masalah perempuan, dan sebagainya. Peserta diminta mengidentifikasi mulai dari pembagian kerja di masing-masing keluarga (rumah tangga), pembagian pengeluaran rutin kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya. Untuk metode ini, peserta dengan pasangannya akan berdiskusi dan menentukan kesepakatannya bagaimana untuk pembagian kerja rumah tangga dan pembagian pengeluaran rutin kebutuhan rumah tangga. Sehingga keterlibatan laki-laki dalam pelatihan ini sangat penting agar laki-laki dapat menyepakati bahwa pekerjaan rumah tangga bukan beban perempuan saja karena laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan serupa dan perempuan juga berhak untuk kepemilikan asset serta peran pengambilan keputusan.

Pengalaman penting Koalisi Perempuan Indonesia pada pelatihan ini adalah anggota balai perempuan dapat menganalisa dampak-dampak yang timbul dalam permasalahan perempuan baik internal dan eksternal. Hasilnya diharapkan dapat diimplementasikan untuk menjalankan roda-roda organisasi. Kaitannya dalam isu energi, GALS dapat diterapkan pada BP PIPA EBT yang ada di Wilayah Jawa Tengah. Melalui metode ini anggota dapat melihat kendala-kendala atau dampak yang timbul akibat penggunaan energi fosil yang selama ini sudah sangat mengkhawatirkan. Serta mengupas lebih luas posisi perempuan dalam pengambilan keputusan kaitannya dengan energi bersih terbarukan.



Gambar 7 Peserta pelatihan didampingi co-fast berdiskusi Di desa Regunung



Gambar 8 Salah satu peserta laki-laki sedang menggambarkan hal yang harus dikerjakan bersama antara laki-laki dan perempuan

ENERGI BERKELANJUTAN BAGI MASYARAKAT

Salatiga, 30 Juni 2019

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada tanggal 27-28 Agustus 2019 telah menyelenggarakan Workshop Pasca Pelatihan Pemahaman Energi Berkelanjutan bagi Konsumen yang diikuti oleh 24 peserta dari Perwakilan Koalisi Perempuan Indonesia wilayah Jawa Tengah, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen Semarang, Lembaga Konsumen Yogyakarta dan Masyarakat Desa Sugihan.

Pelatihan ini adalah tindak lanjut kegiatan yang dilaksanakan di Semarang pada bulan Desember 2018 yaitu Pelatihan Konsumen Cerdas. Kegiatan ini dimaksudkan melihat bagaimana penyebaran informasi terkait konsumen dan energi juga memetakan potensi energi bersih dan tantangannya seperti yang disampaikan oleh Yuni mewakili YLKI dalam sambutan pembukaan.

Lina Moeis Direktur Rumah Energi menyampaikan bagaimana keadaan Indonesia yang masih sangat tergantung dari energi yang berasal dari Fosil, sementara Indonesia melimpah ruah dengan energi angin, matahari, hidro dan juga biomassa. Dari pengalaman bagaimana mengelola project terang dan pemanfaatan Biogas, sangat berharap bagaimana energi bersih dan tersedia ini dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan tidak tergantung dengan energi fosil.

Dalam kegiatan ini Yayasan Dian Desa juga melakukan demo Keren (Tungku Sehat Hemat Energi = TSHE) antara lain Jolento, keren dengan bahan baku kayu / briket dari kayu dan juga Kompom dengan bahan minyak jelantah.

Peserta pelatihan Agus dari Desa Sugihan juga melakukan testimoni penggunaan keren Jolentho dirumahnya, dimana paska pelatihan Desember lalu juga telah melakukan sosialisasi Kompom dengan bahan baku minyak jelantah di Balai desa Sugihan, Kecamatan Tenganan, Kab Semarang. Keren Jolentho digunakan untuk merebus air untuk keperluan mandi terutama di pagi hari dan apabila ada yang hajatan juga menggunakannya. Dari pengalaman dan sosialisasi ini menarik Bapak Kepala Desa Menggunakan juga Keren Jolentho.

Ibu Lasiyem, anggota Balai Perempuan (BP) Gedangan, Kab Semarang menyampaikan pengalamannya menggunakan kompor minyak

jelantah dan telah melakukan sosialisasi kepada Ibu-Ibu Pengajian di RWnya dan juga anggota Koalisi Perempuan Indonesia di Desa Gedangan, Kec Tuntang, Kab Semarang.

Kesempatan ini juga dilakukan kunjungan lapangan untuk melihat langsung pemanfaatan Keren Jolentho di Rumah Pak Agus Desa Sugihan dan Desa Mandiri Energi di Rogomulyo, Kab. Semarang yang telah memiliki instalasi Biogas.

Setelah melihat bagaimana pemanfaatan Jolentho dan juga pemanfaatan Biogas, menambah semangat dan antusiasme Anggota Balai Perempuan untuk memanfaatkan energi terbarukan yang ada didekat mereka dan mulai memetakan potensi energi terbarukan. Ada yang ingin menggunakan keren hemat energi, kompor minyak jelantah dan Jolentho. Namun ini terkendala dengan masih mahalnya alat-alat ini sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Selain bahan baku atau materinya susah di cari juga harus cari dari Jogja. Semangat itu juga terlihat bagaimana antusias peserta ketika ditawarkan untuk magang di Trukajaya untuk melihat dan belajar langsung terkait dengan TSHE dan Juga Biogas.

Ini langkah awal dan juga harapan bagaimana energi bersih, aman dan berkelanjutan dapat terwujud dan mempermudah akses energi bagi perempuan. **(by2019)**



DISKUSI RUTIN BALAI PEREMPUAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI PENGADUAN DAN ADVOKASI ENERGI BERSIH TERBARUKAN (BP PIPA EBT).

Kegiatan diskusi rutin merupakan program rutin yang dilakukan oleh setiap Balai Perempuan (BP) Koalisi Perempuan Indonesia. Hal tersebut sebagai indikator bahwa Balai Perempuan itu aktif. Jadwal pelaksanaan diskusi rutin tersebut bergantung kesepakatan/ jadwal yang dibuat oleh anggota Balai, ada yang sebulan 2 kali, sebulan sekali tetapi rata-rata sebulan sekali. Ada berbagai pembahasan yang dilakukan dalam diskusi rutin di Balai Perempuan yang itu tidak perlu tema khusus tetapi mengalir saja tergantung kebutuhan dan permasalahan sehari-hari. Misal terkait mahalannya harga sembako dan bagaimana mereka menyasiatkannya, KDRT dan juga soal implementasi nilai-nilai organisasi Koalisi Perempuan Indonesia yaitu keberagaman, sisterhood, anti kekerasan, berwawasan lingkungan dan lain-lain. Tetapi ada beberapa balai perempuan yang dalam diskusi rutinnnya mempunyai tema khusus. Seperti di 4 Balai Perempuan di Kota Salatiga dan 4 Balai Perempuan di Kabupaten Semarang yang tema diskusinya terkait Energi Bersih Terbarukan (EBT). Hal tersebut dikarenakan Balai Perempuan di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang merupakan Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Energi Bersih Terbarukan (BP PIPA EBT).

Pembentukan BP PIPA EBT di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dimulai sejak bulan Februari sampai Juli 2019. Tetapi diskusi rutin terkait tema EBT baru dimulai sejak bulan Mei dan berlangsung sampai bulan Agustus 2019. Diskusi rutin dengan tema "Isu Perempuan dan Energi Bersih Terbarukan" berlangsung sejak bulan Mei- Agustus di 8 BP PIPA EBT yaitu di BP Bener, BP Tegaron, BP Gedangan, BP Regunung untuk Kabupaten Semarang dan BP Blotongan, BP Kutowinangun Lor, BP Mangunsari dan BP Noborejo untuk Kota Salatiga. Diskusi rutin tersebut difasilitasi oleh Endah Puspitanti, Sekretaris Wilayah Jawa Tengah dan Rulia Iva Dhalia, enumerator study baseline yang dilakukan secara bergantian dimasing-masing Balai Perempuan. Berikut gambaran diskusi rutin tematik BP PIPA EBT

A. DESA TEGARON.

Diskusi diikuti peserta sejumlah 27 orang, yang bertempat di kediaman Sekretaris Balai Perempuan Siti Asnawiyah. Adapun tema diskusi yaitu "Isu perempuan dan Energi bersih terbarukan", dengan difasilitatori Endah. Pada pertemuan balai ini dimulai dengan review Pelatihan Advokasi Dasar, yang membahas, pertama tentang nilai-nilai dari Koalisi Perempuan Indonesia. Antara lain, nilai anti kekerasan, nilai kemandirian, nilai kejujuran dan nilai persaudaraan.

Dalam kesempatan itu, fasilitator mengingatkan tentang nilai anti kekerasan, dan tidak membiarkan adanya kekerasan baik kekerasan fisik, seksual, psikis maupun ekonomi. Kemudian nilai kemandirian. Bahwa perempuan harus bisa mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain, serta berani tampil di depan umum. Pro pada kejujuran dan harus menyampaikan informasi yang sesuai dan tidak ada dusta. Nilai persaudaraan dimana sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia kita harus saling menjaga solidaritas kebersamaan, menjaga rasa persaudaraan, atau sisterhood. Satu saudara perempuan karena saling memperjuangkan hak kita. Maka jika ada perselisihan harus di selesaikan dengan baik dan jangan sampai memunculkan kesalahpahaman. Karena jika terjadi salah paham akan membuat sakit hati dan membuat hidup menjadi tidak nyaman atau tentram. Sehingga perlu segera diselesaikan dan dikomunikasikan ketika ada masalah. Lalu bagaimana jika ada anggota yang salah paham?, apa yang harus dilakukan?. Salah satu peserta diskusi mengatakan harus mengadakan pendekatan ke anggota dan mencoba menjelaskan permasalahan, mendamaikan agar permasalahan tidak semakin panjang dan rumit.

Pembahasan kedua tentang iuran anggota, fasilitator menjelaskan adanya iuran anggota merupakan bagian dari bagaimana organisasi berjalan. Sementara ini iuran di BP Tegaron yang sudah berjalan disepakati berjumlah Rp. 5000 per bulan.

Kemudian pada pembahasan ketiga yang merupakan tema utama yaitu membahas tentang Potensi Energi. Fasilitator mengingatkan potensi energi di desa Tegaron, antara lain berupa air, angin, matahari, kayu bakar, kotoran manusia dan sampah. Potensi ini perlu diingatkan kembali kepada anggota bahwa sebetulnya energi sudah tersedia disekitar dan kita sebagai manusia terutama perempuan harus bijak memanfaatkannya. Tidak bisa bergantung hanya pada gas melon (3kg) saja. Karena sumber energi fosil yang diambil secara terus menerus suatu saat akan habis juga.

1. Distribusi Energi

Fasilitator menyampaikan pembahasan mengenai gas melon (3 kg) apakah di desa Tegaron mengalami kelangkaan gas dan distribusikan merata atau tidak. Di Tegaron ternyata gas melon sudah ada di beberapa tempat yaitu seperti bagan berikut:

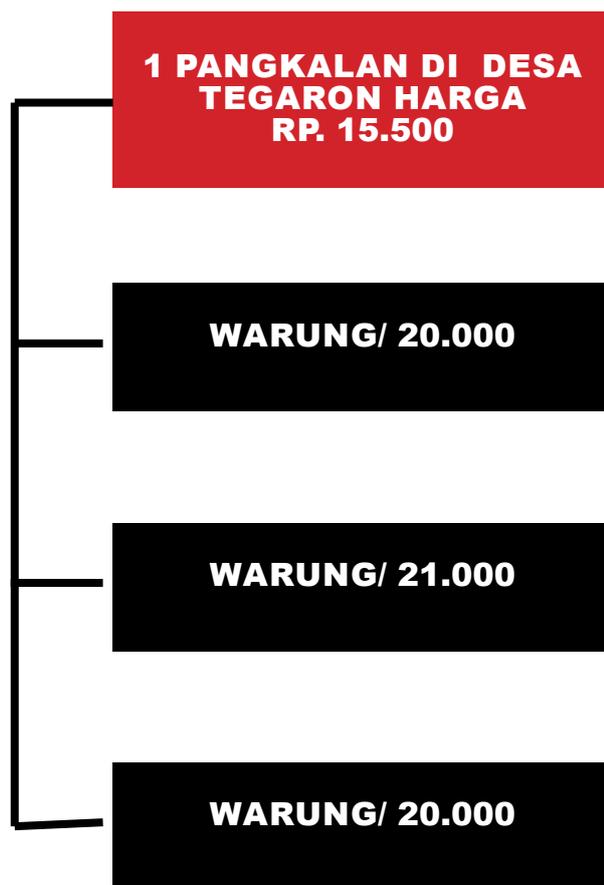


Table 1. Siklus distribusi gas di desa Tegaron dari pangkalan ke warung-warung dengan harga yang bervariasi

Di desa Tegaron sampai saat ini belum terjadi kelangkaan gas, harga gas cukup stabil meskipun di hari besar seperti hari raya idul fitri dan harga juga stabil berkisar Rp. 20.000 – Rp. 22.000 dan sebagian besar anggota selain memakai gas juga masih banyak yang menggunakan tungku kayu bakar, tetapi belum menggunakan tungku sehat.

2. Potensi Energi Bersih Terbarukan di desa Tegaron

Sebagian besar anggota selain memakai gas juga masih banyak yang menggunakan tungku kayu bakar, tetapi belum menggunakan tungku sehat. Di BP Tegaron pada saat pertemuan rutin balai.

Selain penyampaian dari fasilitator, Bu Asnawiyah selaku Sekretaris BP PIPA EBT Desa Tegaron juga mensosialisasikan penggunaan kompor minyak jelantah pada peserta diskusi dengan pengalamannya sebagai pengguna kompor minyak jelantah dari YLKI. Sehingga dia sudah merasakan manfaat kompor jelantah sebagai EBT. Dari penyampaian dari ibu Asnawiyah tersebut banyak anggota yang tertarik dan sepakat akan mengumpulkan minyak jelantahnya, minyak jelantah yang dikumpulkan akan ditimbang dan akan dihargai, tetapi belum disepakati berapa harga minyak jelantah per kg nya. Pada pertemuan berikutnya akan di bahas untuk harga minyak jelantah.

Energi bersih terbarukan yang menjadi minat perempuan anggota BP Tegaron adalah minyak jelantah karena merasa sayang jika tidak dimanfaatkan, selain itu tertarik dengan tungku Jolento dan keren karena potensi jelantah dan kayu bakar di Desa Tegaron cukup tersedia. Untuk memfasilitasi peralihan ke energi bersih terbarukan maka perlu adanya dukungan dari desa.

3. Pengaduan dan Advokasi

Untuk pengaduan terkait energi, akan disediakan buku besar di buat langsung kolom-kolomnya, yaitu terdiri dari Kronologi kasus yang terdiri dari tanggal, bulan tahun kejadian, formulir surat pengantar, dan rekapan surat pengantar serta format pengaduan dan penanganan kasus.

Untuk itu Advokasi yang akan dilakukan adalah audiensi ke desa untuk menyusun Peraturan desa Energi. Advokasi energi desa Tegaron dilaksanakan bulan Agustus untuk mengupayakan dan peraturan desa Energi.

Selain penyampaian dari fasilitator, Ibu Asnawiyah selaku Sekretaris BP PIPA EBT Desa Tegaron juga mensosialisasikan penggunaan kompor minyak jelantah pada peserta diskusi dengan pengalamannya sebagai pengguna kompor minyak jelantah dari YLKI. Sehingga dia sudah merasakan manfaat kompor jelantah sebagai EBT.

B. Diskusi Rutin di BP PIPA EBT Desa Bener

Dalam diskusi rutin di BP PIPA EBT Desa Bener pada tanggal 15 Juli 2019 dengan fasilitator Rulia Iva Dhalia dilakukan kunjungan ke Dusun Cebongan yang disana sudah ada warga yang menggunakan biogas yang merupakan pilot project dari Dinas Lingkungan Hidup dimana ada 2 ekor sapi yang menghasilkan biogas yang awalnya disalurkan untuk 4 rumah. Tetapi berhubung 1 ekor sapi mati sehingga tidak lagi bisa mencukupi untuk 4 rumah tangga tetapi hanya 1 rumah pertama yang bisa hidup biogasnya. Sebagai solusi akan dicampur dengan kotoran kambing agar biogas tetap jalan.

Terkait pengaduan energi yang masuk ke BP PIPA EBT Desa Bener masih seputar penggunaan gas elpiji 3 kg

NO	Pengaduan	Tanggal/ bulan/Tahun
1.	Pentil dan segel tidak ada	5 Juli 2019
2.	Pangkalan hanya menjual ke warung saja	9 Juli 2019
3.	Tabung teyengen	3 Juli 2019
4.	Tidak semua pangkalan tabung 3 kg berharga Rp. 15.500	10 Juli 2019
5.	Distribusi jika pangkalan ke warung dan warung ke masyarakat	11 Juli 2019
6.	Bu Im melaporkan jika biasanya tabung untuk seminggu saat ini 4 hari habis	11 Juli 2019

Aturan Pertamina terhadap pangkalan gas :

1. Dilarang menaikkan harga gas diatas harga jual eceran tertinggi (HET)
2. Pangkalan resmi harus memasang papan nama, ijin dan harga gas
3. Peredaran gas dilarang untuk melakukan penjualan ke pengecer karena dapat berdampak kelangkaan gas

Dalam diskusi rutin di semua BP PIPA EBT Desa dan Kelurahan lain, permasalahan soal energi untuk memasak hampir sama. Yang membedakan hanya potensi yang dimiliki oleh desa dan kelurahan masing- masing yang beda.

Berikut potensi EBT di 8 Desa dan Kelurahan BP PIPA EBT di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang.

1. Balai Perempuan Koalisi Perempuan Indonesia Cabang Salatiga

No	Nama Balai	Potensi EBT
1.	BP Blotongan	Kotoran Sapi
2.	BP Kutowinangun Lor	Kotoran manusia, kotoran sapi, sampah di Pasar Blauran
3.	BP Mangunsari	Kotoran sapi dan sampah Pasar Sapi
4.	BP Noborejo	Kotoran sapi dan kotoran manusia

2. Balai Perempuan Kab. Semarang

No	Nama Balai	Potensi EBT
1.	BP Gedangan	Sampah organik (sudah ada Perdes) dan minyak jelantah
2.	BP Bener	Kotoran sapi, air, kotoran manusia, limbah tahu
3.	BP Tegaron	Minyak jelantah, kotoran manusia dan kayu bakar
4.	BP Regunung	Kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran manusia, air terjun, kayu bakar dan limbah gergajian kayu



Dok : diskusi rutin BP PIPA EBT Desa Bener



Dok : Diskusi Rutin BP PIPA EBT Mangunsari



Dok; Diskusi rutin BP PIPA EBT Tegaron



PELATIHAN ADVOKASI DASAR BALAI PEREMPUAN SEBAGAI PUSAT INFORMASI PENGADUAN DAN ADVOKASI ENERGI (BP PIPA ENERGI) JAWA TENGAH

Balai Perempuan adalah struktur kepengurusan organisasi Koalisi Perempuan Indonesia di tingkat desa atau kelurahan. Balai Perempuan ini beranggotakan minimal 30 orang perempuan di desa atau kelurahan. Ada 1.047 balai perempuan Koalisi Perempuan Indonesia berada di 200 kabupaten/ kota dan 15 provinsi. Dari 1.047 balai perempuan tersebut masing-masing mempunyai kekhasan dalam fokus, bidang, dan kerja- kerja advokasinya. Ada Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi Jaminan Kesehatan Nasional atau disebut BP PIPA JKN, BP PIPA Perkawinan Anak, BP PIPA Kebencanaan dan BP PIPA Energi. Dan untuk BP di Jawa Tengah adalah BP PIPA Energi.

BP PIPA Energi merupakan BP yang dibangun bersama sebagai pusat informasi, pengaduan dan advokasi. Tujuan dari BP Energi yaitu menjadi pusat informasi dan membagikan informasi, mengumpulkan data melalui catatan energi, dialog warga, penerimaan pengaduan dari warga, mengumpulkan data ketidakadaan akses pada energi bersih dan terbarukan, mengkaji ketiadaan energi bersih terbarukan, mendata sumber-sumber energi yang ada di sekitarnya.

Dalam BP PIPA Energi mempunyai struktur kepengurusan Sekretaris Balai (Sekbal) dan dan beberapa Dewan Balai (Debal). Untuk menjalankan peran dan fungsinya yaitu sebagai Pusat Informasi Pengaduan dan Advokasi sangat diperlukan kemampuan dan keterampilan baik managerial maupun teknis bagi pengurus untuk melakukan kerja-kerja sebagai BP PIPA Energi. Dalam menjawab kebutuhan tersebut telah dilaksanakan dua tahap pelatihan advokasi BP PIPA Energi yang berlangsung selama periode Februari – Agustus 2019.

Pelatihan BP PIPA tahap pertama dilaksanakan di 8 Balai Perempuan (BP) antara lain BP Bener, BP Gedangan, BP Regunung, BP tegaron untuk Kabupaten Semarang dan BP Blotongan Salatiga, BP Mangunsari, BP Noborejo, dan BP Kutowinangun Lor untuk Kota Salatiga. Adapun kegiatan berlangsung sepanjang periode Februari – Juli 2019, dilaksanakan masing- masing selama 4 hari dari pukul 09 : 00 s/d 16 : 00, diikuti oleh 30 orang peserta per BP dan bertempat di BP masing-masing.

Pelatihan tahap pertama ini adalah Pelatihan Advokasi Dasar yang kami biasa menyebut dengan istilah Pendidikan Kader Dasar (PKD). Kegiatan dilaksanakan dan di fasilitasi oleh pengurus dan kader dari Wilayah Jawa Tengah yaitu Endah Puspitanti, Masnuah, lim, Harbinah, Hanifah Muyasarah, dan Rulia Iva Dhalia dengan cara bergantian dengan masing- masing BP oleh dua fasilitator.

Adapun materi dari Pelatihan Advokasi Dasar ini adalah

1. Orientasi peserta (pengenalan, harapan dan kekhawatiran selama proses pelatihan),
2. Review Gender dan Analisa Gender,
3. Review Analisa Gender dan Analisa Sosial,
4. Per – KPI an (keorganisasian), Peran dan Fungsi Kader dalam isu dan BP PIPA EBT, 5. Advokasi EBT

Dalam pelatihan tersebut masing-masing BP PIPA mempunyai Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang tentunya masing- masing berbeda karena situasi dan potensi yang berbeda tetapi pada prinsipnya kebutuhannya sama yaitu energi bersih terbarukan.

1. Melakukan diskusi rutin
2. Membuka Sekretariat BP PIPA Energi
3. Mendaftarkan BP PIPA ke pemerintah desa/ kelurahan
4. Mensosialisasikan BP PIPA Energi kepada masyarakat agar menjadi pusat informasi,
5. potensi masing- masing desa / kelurahan yang dikelola oleh perempuan
6. Evaluasi 3 bulan kedepan akan dilihat pada laporan di BP PIPA Energi apakah yang sudah dilakukan pada tahap awal sudah terealisasi atau belum dengan melihat indikator dukungan dan hambatan.



Dokumentasi PKD Blotongan

5. pengaduan dan advokasi bagi semua.
6. Sosialisasi kepada warga masyarakat di desa dan kelurahan akan potensi EBT yang ada di desa dan kelurahan masing- masing
7. Mendorong peraturan desa/ kelurahan mengenai energi
8. Mendorong pengadaan EBT sesuai dengan

Pelatihan Advokasi BP PIPA Energi tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 Agustus di Salatiga dengan tema Penguatan Kapasitas BP PIPA EBT. Pelatihan ini diikuti oleh 26 orang peserta yang berasal dari pengurus 4 BP PIPA Kabupaten Semarang, pengurus 4 BP PIPA Kota Salatiga, pengurus Cabang Kota Salatiga dan pengurus Wilayah Jawa Tengah.

Adapun tujuan dan hasil yang diharapkan dari pelatihan tahap kedua tersebut adalah para pengurus bisa melakukan advokasi EBT sesuai dengan tingkatan masing-masing, yaitu pengurus BP bisa melakukan advokasi EBT ditingkat desa/kelurahan, pengurus cabang ditingkat kabupaten atau kota dan pengurus wilayah ditingkat provinsi. Pelatihan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Nasional (Setnas Koalisi Perempuan Indonesia) dengan fasilitasi oleh Stephana W.Sanith Kono dan Ria Yulianti.

Susunan materi yang disampaikan dalam pelatihan ini adalah :

1. Orientasi,
2. Refleksi pengalaman Advokasi,
3. Review Advokasi Kebijakan Publik yang berperspektif feminis,
4. Review Advokasi Berbasis Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan,
5. Model-model Advokasi,
7. Review Kebijakan Publik sebagai produk politik, Mengenal kebijakan publik tentang perempuan dan energi,
8. Pembentukan Peraturan dan Perundang-undangan,
9. Tahapan Advokasi:
 - a. Merumuskan isu strategis,
 - b. Membangun kelompok inti,
 - c. Menyusun rencana advokasi,
10. Strategi Advokasi: Melakukan lobi, negosiasi, aksi, refleksi dan Evaluasi Strategi Advokasi,
11. Perangkat advokasi kebijakan: Mengenal perangkat advokasi kebijakan publik, Validitas Dan Efektivitas Perangkat Advokasi, Etika Komunikasi dalam advokasi,
12. Praktek strategi advokasi: Refleksi dan evaluasi tahapan advokasi, Materi VI Monitoring Implementasi Kebijakan Publik dan RTL.



PELATIHAN GALS DI JAKARTA DAN KOTA SALATIGA

Perempuan memainkan peran penting dalam menyediakan energi dan energi dalam rumah tangga. Meskipun begitu dalam proses pengambilan keputusan seringkali perempuan tidak dilibatkan sementara mereka mungkin memiliki pilihan yang berbeda dalam layanan energi yang diperlukan dalam rumah tangga. Energi sangat penting bagi wanita, tidak hanya memasak tetapi juga untuk penerangan. Di beberapa daerah di Indonesia, listrik telah digunakan secara produktif selain untuk penerangan, seperti untuk penerangan menenun di sore hari. Masalah gender bukan hanya tentang perempuan tetapi tentang hubungan gender antara laki-laki dan perempuan. Namun sampai hari ini masalah gender sering disesatkan dengan masalah perempuan. Menyadari isu tersebut, HIVOS dalam kerangka kerja kemitraan strategis energi hijau dan inklusif melihat pentingnya bagi pria dan wanita untuk memahami isu-isu gender dan menerapkannya di tingkat rumah tangga, karena mitra SP energi saat ini, yaitu *Institute for Essential services Reform (IESR)*, Koalisi Perempuan Indonesia dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tengah melakukan advokasi di tingkat masyarakat dan HIVOS merasa penting untuk memberikan pelatihan gender bagi mitra lokal. Pelatihan yang disebut *Gender Analisis Learning System* atau GALS telah dilaksanakan 3 kali, di Jakarta, Kota Salatiga dan kabupaten Semarang. GALS atau *Gender Analisis Learning System* merupakan pelatihan yang berbeda dengan pelatihan lainnya, dalam praktiknya metode yang digunakan adalah menggambar dan membuat lagu. Metode ini diterapkan untuk memudahkan peserta agar dapat terlibat dan lebih fokus dalam pembelajaran GALS dimana jika ada peserta yang tidak bisa membaca dan menulis dapat mengikuti pelatihan dengan menggambarkan apa yang telah didiskusikan. Pelaksanaan pelatihan GALS ini bertujuan; (a) agar peserta dapat memahami isu-isu gender dan dapat menerapkannya ke dalam sektor energi bersih terbarukan, (b) peserta dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan terkait dengan energi bersih terbarukan, (c) peserta dapat

melakukan advokasi tentang gender dan energi bersih terbarukan di berbagai level mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional, dan (d) peserta dapat mengimplementasikan pelatihan GALS pada kegiatan-kegiatan organisasi misalnya diskusi rutin

Pelatihan GALS pertama kali dilakukan tanggal 14-16 Agustus 2018 di Favehotel Wahid Hasyim – Jakarta yang difasilitasi oleh Mbak Intan atau biasa teman-teman familiar dengan mba Hung. Kegiatan ini diikuti oleh mitra HIVOS, yaitu Koalisi Perempuan Indonesia, Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Trukajaya. Koalisi Perempuan Indonesia mengikutsertakan 2 orang staff Setnas dari Pokja Penguatan organisasi, Meidina Ingrid dan divisi Litbang, Dewi Yani, juga melibatkan teman-teman wilayah Jawa Tengah, yakni Endah selaku Sekwil Jateng dan Satuf Hidayah selaku sekcab Salatiga. Sehingga total peserta pelatihan sebanyak 6 orang terdiri dari 5 orang perempuan dan 1 orang laki-laki dari Trukajaya.

Hari pertama pelatihan, peserta diajak berkenalan dengan menuliskan harapan dan menuliskan nama diri dengan memberikan kata motivasi untuk masing-masing peserta dilihat dari 2 huruf depan nama panggilan dan menggambarkan sesuatu sebagai brand diri. Contohnya Meidina menuliskan nama kecilnya, DINA. Dari 2 huruf depan nama Dina, dirangkailah kalimat motivasi yaitu *DI-gapailah* yang artinya gapailah semua mimpi setinggi, sejauh, dan seberat apapun itu karena kita tahu burung saja masih mau belajar dan rela jatuh bangun ketika belajar terbang maka dengan perjuangan yang tidak sia-sia akhirnya di burung dapat melihat indahnya dunia. Untuk brand atau simbol diri Dina menggambarkan seekor burung yang sedang terbang. Begitu seterusnya sampai seluruh peserta berkesempatan mengenalkan dirinya dengan menyebutkan kata motivasi dan simbol diri. Setelah masing-masing membuat kata motivasi dari nama masing-masing dan membuat simbol diri, peserta diajak untuk meditasi dengan cara memejamkan mata dan mendengarkan alunan musik klasik sekitar 30 menit. Dalam prosesnya peserta diajak untuk memikirkan atau merencanakan kehidupan-kehidupan yang selama ini diimpikan. Perencanaan kehidupan ini yang akan di capai dalam kurun waktu 10 tahun kedepan.

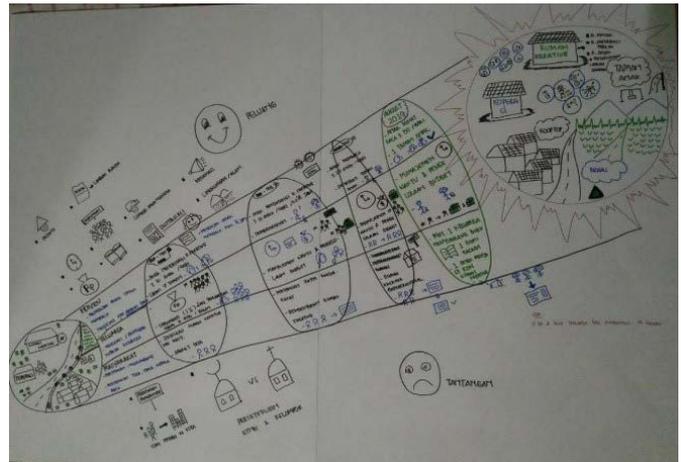


Gambar 1 Gambar dari salah satu peserta mengenai apa yang di cita-citakan

Setelah meditasi, peserta diminta untuk menggambarkan semua yang ada di bayangan pada saat meditasi sebelumnya. Pada Gambar 1 merupakan contoh dari keinginan yang dicita-citakan dari salah satu peserta dari Koalisi Perempuan Indonesia, dimana dalam gambar tersebut adalah adanya keluarga yang harmonis dengan 2 anak dan 1 suami, memiliki hubungan baik dengan keluarga besar dan juga dengan masyarakat sekitar serta saya ingin memiliki ruang pintar yang ada di sekitar rumah. Ruang pintar ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan gadget pada anak-anak, remaja dan usia dewasa. Berangkat dari hal tersebut dimana saat sekarang merupakan situasi dilema bagi orang tua tentang penggunaan gadget, sehingga peserta berfikir untuk mendirikan ruang pintar ini tempat membaca bagi anak-anak, remaja dan sampai dewasa. Selain sebagai ruang baca juga sebagai ruang belajar bagi anak-anak, sharing pelajaran yang didapat disekolah dan juga bagi orang dewasa bisa dijadikan wadah untuk mengajar bagi anak-anak. Kedepan peserta ini mengharapkan ruang baca bisa diintegrasikan di Balai Perempuan sehingga anggota Balai Perempuan

dapat memaksimalkan fungsi sebagai pendidik bagi anak-anak, remaja dan bahkan orang dewasa.

Masing-masing peserta diminta untuk mempresentasikan gambar kepada peserta lain sehingga saling mengetahui satu sama lain tentang gambar atau impian selama ini. Setelah seluruh peserta menceritakan gambarnya masing-masing, selanjutnya peserta diminta menggambarkan kembali kedalam tools yang disebut dengan perjalanan tol ganda seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2 Perjalanan tol ganda, Selanjutnya gambar tersebut diidentifikasi bersama, gambar mana yang mewakili hal yang disukai

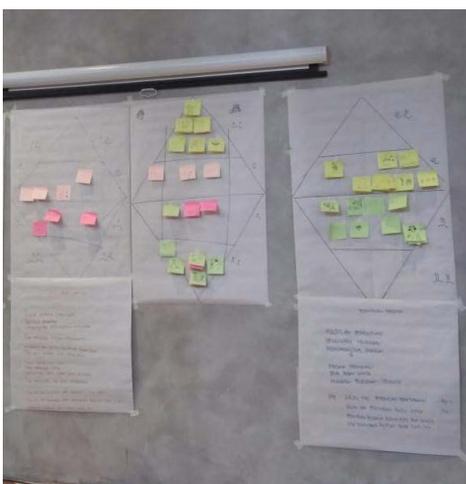
Tools ini merupakan gambaran dari seluruh cita-cita dan harapan peserta yang akan di capai ke depan. Peserta diminta menggambarkan kembali cita-cita 10 tahun kedepan didalam gambar matahari dan membuat gambar yang paling realistis untuk dicapai di tahun pertama dari perencanaan 10 tahun kedepan dilanjutkan dengan perencanaan yang akan dicapai dalam tiga bulan pertama, tiga bulan ke-2, tiga bulan ke-3 Peserta diminta untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang di sekitarnya dan menggambarkannya di bagian atas tol ganda tersebut. Selain mengidentifikasi peluang, peserta juga diminta mengidentifikasi tantangan-tantangan disekitar dan menggambarkan di bagian bawah garis tol ganda. Setelah gambar selesai, masing-masing kelompok diminta membuat lagu dengan menyanyikan isu-isu, kondisi, tantangan, peluang yang ada berdasarkan gambar masing-masing kelompok.

Hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan aplikasi tools kedua yakni *Diamond Gender Anpowerment / Berlian Pemberdayaan Gender*. Diamond digunakan sebagai simbol sesuatu yang berharga, yang diinginkan oleh manusia, yaitu kemanusiaan itu sendiri. Ketimpangan status atau kesetaraan, budaya, masyarakat (kepala suku, pemerintah, pemegang modal, media) ketimpangan tersebutlah yang membuat kemanusiaan tidak utuh. Kegiatan dimulai dengan membagi kelompok, kelompok laki-laki dan perempuan. Masing-masing peserta dalam kelompok diminta untuk menggambarkan minimal 5 hal yang disukai dan 5 hal yang tidak disukai. Masing-masing peserta mulai menempelkan 5 gambar dari hal yang disukai tersebut di bagian paling atas gambar diamond/Berlian pemberdayaan dengan 2 simbol senyum dan 5 hal yang tidak disukai ditempel dibagian paling bawah atau yang ada 2 simbol badmood.

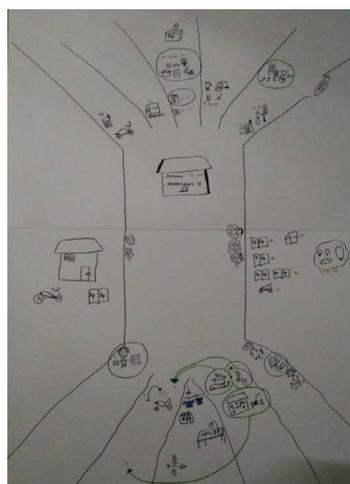
bersama dan gambar mana yang mewakili hal yang tidak disukai bersama. Setelah identifikasi berkelompok, kemudian dilakukan identifikasi antar kelompok. Tools berlian pemberdayaan gender ini dapat digunakan di basis atau dimulai dari keluarga. Hanya saja tools ini harus melibatkan laki-laki jika ingin isu-isu yang muncul lebih spesifik bukan hanya isu permukaan saja. Keuletan dan penyampaian bahasa juga perlu ditekankan agar dalam prosesnya peserta memahami dan mampu menuju isu-isu yang di arahkan. Catatan penting lainnya adalah

tools ini juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan keuangan hanya perlu peningkatan kapasitas fasilitator yang akan menggunakan tools tersebut. Kendala pada saat pelatihan karena peserta laki-laki hanya 2 orang sehingga isu-isu yang diharapkan tidak banyak yang muncul, malah lebih menggambarkan hobi bukan permasalahan-permasalahan gender di lingkungan sekitar. Situasi seperti ini bisa saja terjadi maka sebaiknya fasilitator selalu mengarahkan kepada peserta agar masuk kedalam isu-isu gender seperti yang diharapkan. Dalam tools ini prakteknya memformulasikan kembali aspek-aspek agar sesuatu yang mendasar agar menjadi lebih khusus atau spesifik. Tools diamond atau Berlian pemberdayaan gender menggunakan indikator partisipatoris artinya peserta yang menggambarkan sendiri indikator pemberdayaan, bukan dari kemauan fasilitator sehingga semua berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh peserta pelatihan.

Sesi selanjutnya adalah mengaplikasikan tools ke-3 yakni *Pohon Keluarga Bahagia*. Tools ini adalah untuk menggambarkan peran serta kedudukan laki-laki dan perempuan dalam keluarga termasuk penghasilan yang dihasilkan laki-laki maupun perempuan. Untuk itu peserta harus menggambarkan seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam 1 rumah, pekerjaan, tugas dalam rumah tangga dan benda atau aset yang dimiliki masing-masing anggota keluarga.



Gambar 3.
Berlian Pemberdayaan / Diamond



Gambar 4
Pohon Keluarga bahagia



Gambar 5
Pohon Analisis

Hari Ke tiga membuat tools Pohon Analisis. Pohon analisis ini berbentuk pohon dengan batang dahan dan akar. Masing- masing bagian memiliki fungsi gambar sendiri, bagian dahan menggambarkan solusi, bagian akar menggambarkan persoalan/ permasalahan, bagian batang menggambarkan impian pada bagian atas dan kondisi sekarang pada bagian bawah batang.

Masing-masing kelompok untuk mengidentifikasi poin-poin yang sama pada bagian akar dan dahan jika ada yang sama maka digabungkan. Kemudian masing-masing kelompok untuk membuat perencanaan 1 tahun kedepan dilihat dari solusi dan permasalahan yang ada. Setelah itu setiap kelompok membuat lagu dengan menuliskan isi atau hal-hal yang besarnya saja dari permasalahan atau solusi dari pohon analisis tersebut. Seperti sebelumnya, kegiatan diakhir dengan presentasi hasil dan membuat lagu dari hasil presentasi.

Setelah melakukan pelatihan di Jakarta, selanjutnya pelatihan dilaksanakan di Kota Salatiga pada bulan Oktober 2018. Pelatihan diikuti oleh peserta dari Koalisi perempuan Indonesia Setnas, Wilayah Jawa Tengah, Cabang Kota Salatiga dan Balai Perempuan yang ada di Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Selain itu juga melibatkan beberapa jaringan diantaranya YLKI, TRUKAJAYA. Peserta pelatihan ini seluruhnya perempuan, tidak ada laki-laki. Dalam pelatihan ini, peserta yang telah mengikuti pelatihan di Jakarta diajak untuk berpartisipasi sebagai co-fasilitator. Hari pertama, sekwil Jawa Tengah, Endah membuka kegiatan sekaligus mengarahkan peserta dalam membuat motivasi dari awalan

nama masing-masing. Dina dari setnas Koalisi Perempuan Indonesia melanjutkan kegiatan dengan memandu meditasi (visioning Journey), dilanjutkan oleh Dewi dari Setnas Koalisi Perempuan Indonesia untuk menyampaikan tools Diamond / Berlian Pemberdayaan. Eva dari YLKI melanjutkan untuk menyampaikan perjalanan tol ganda. Sebagai co-fast, semua masih membutuhkan bimbingan dari fasilitator utama, yaitu mbak intan, akan tetapi ini merupakan pengalaman yang sangat baik bagi co-fast pemula.

Dalam pelatihan ini menggambar adalah kendala yang paling utama, sama dengan pelatihan di Jakarta. Peserta merasa tidak cukup baik untuk menggambar, tetapi yang diminta bukan gambar yang bagus tetapi gambar tersebut sebagai simbol dan cukup dipahami sebagai keinginan dari masing-masing peserta. Namun yang paling penting adalah menggali impian dari para peserta, karena peserta seperti lupa akan impiannya sendiri. Yang menjadi fokus adalah kebutuhan anak dan suami, bukan kebutuhan dan mimpi sendiri.

Perlahan semua peserta menggali impiannya dan meenggambarkannya. Seperti pelatihan sebelumnya, diakhir pelatihan peserta diminta untuk membuat lagu dari hasil tools yang telah diselesaikan. Meski awalnya malu-malu tetapi pada sesi dan hari berikutnya, peserta sangat bersemangat bernyanyi diiringi tarian. Peserta juga diminta untuk lebih berani untuk berbicara didepan seperti melakukan perkenalan, melakukan presentasi dalam setiap sesi dan semakin berani mengajukan pendapat masing-masing. **(dina&dedew)**



Gambar 6 Peserta saling berbagi tentang impian masing-masing dalam 5 tahun ke depan



Gambar 7 Peserta berdiskusi untuk melihat impian mana yang sama diantara peserta

LASIYEM, DORONG PEREMPUAN MENGAKSES KOMPOR MINYAK JELANTAH

Lasiyem seorang Ibu Rumah Tangga yang tinggal di Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kab Semarang. Ia anggota Koalisi Perempuan Indonesia Balai Perempuan Gedangan, mengenal Koalisi Perempuan Indonesia sejak tahun 2017. Pada tahun 2018, Lasiyem mengikuti Pendidikan Kader Dasar (PKD) sehingga resmi menjadi anggota.



Bulan Desember 2018 ia mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan Pendidikan Konsumen Energi. Kegiatan berlangsung selama 3 hari di Kota Semarang. Selain mendapatkan informasi dan edukasi tentang energi, fasilitator akan memperkenalkan sekaligus mempraktekkan penggunaan tungku sehat dan kompor minyak jelantah.

Setelah mengikuti Pendidikan Konsumsi Energi, Lasiyem tertarik ingin menggunakan kompor minyak jelantah. Ia langsung memesan melalui Tokopedia.

Jumat, 28 Juni 2019 ibu dua anak ini diminta Widjanarko fasilitator dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk menyampaikan testimoni. Pada acara Workshop Pasca Pelatihan Pendidikan Energi di Desa Regunung, ia menceritakan pengalamannya menggunakan

kompor minyak jelantah. “Daripada minyaknya dibuang atau bingung mau diapakan lebih baik dimanfaatkan. Sekarang sudah ada solusinya,” tuturnya.

Kompor minyak jelantah bentuknya hampir sama dengan kompor Hock. Sumbu kompor didalamnya agak kasar. “Mungkin desainnya memang seperti itu. Sumbunya saya jadikan dua, supaya awet diganti satu persatu,” tambahnya, “Kompor minyak jelantah di atasnya ada semacam kitiran tetapi tidak berputar.”

Lasiyem menggunakan kompor minyak jelantah untuk memasak air. Sementara untuk memasak sayur menggunakan gas LPG.

“Kompor saya pakai untuk merebus air, satu ceret hanya 15 menit. Apalagi udara di tempat saya dingin,” jelasnya, “Jadi sering sekali kami mandi pakai air hangat.” Meski belum menjadi alat pokok, Lasiyem tetap memfungsikan kompor itu untuk memperingan pekerjaan yang lain.

Bulan Maret 2018 menjadi awal bagi Lasiyem untuk mengajak anggota dan masyarakat di Desa Gedangan untuk menggunakan energi bersih. Salah satunya minyak jelantah yang bisa didaur ulang sebagai sumber energi. Ia mulai menyampaikan di berbagai forum seperti PKK RT, RW, Dawis, Muslimat.

Bahkan mencoba menjalin komunikasi dengan pemerintah desa untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Selain mensosialisasikan secara langsung dalam forum, ia juga membagikan informasi melalui grup WhatsApp. Mengenalkan kompor minyak jelantah sebagai energi alternatif.

“Sulit memang, mengajak orang untuk memulai perubahan bukan hal yang mudah. Kadang ketika share informasi ke grup tidak ada yang merespon,”ujarnya. Meski begitu, ia tetap bertekad ingin melakukan sosialisasi lebih jauh lagi melalui kerja sama dengan pemerintah desa.

KOALISI PEREMPUAN INDONESIA DORONG PEREMPUAN MENJADI AGEN PERUBAHAN

Koalisi Perempuan Indonesia merupakan sebuah organisasi massa yang anggotanya perempuan. Saat ini basis anggota Koalisi Perempuan Indonesia tersebar di 16 provinsi. Peningkatan kapasitas anggota Koalisi Perempuan Indonesia dilakukan melalui Pendidikan Kader Dasar (PKD). Pada tahapan ini, Koalisi Perempuan Indonesia memberikan pendidikan penyadaran hak-hak perempuan.

Selain melakukan pemberdayaan, Koalisi Perempuan Indonesia turut terlibat dalam advokasi kebijakan untuk perempuan. Tahun ini Koalisi Perempuan Indonesia mengangkat isu perempuan dan energi.

Ketiadaan energi berdampak pada aktivitas perempuan dalam menjalankan kegiatan rumah tangga. Persoalan energi seperti mati listrik, kelangkaan gas LPG, Belum lagi ketika harga gas LPG mahal atau isi tabung tidak sesuai.

Maka untuk menangani masalah ini, Koalisi Perempuan Indonesia secara khusus membentuk suatu wadah untuk mendorong keterlibatan perempuan. Adapun upaya yang dilakukan yaitu membangun Balai Perempuan sebagai Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi Energi Selain mengumpulkan dan membagikan informasi tentang Energi Bersih Terbarukan (EBT), BP Pipa energi menjadi sarana untuk berdialog dengan pemerintah desa/daerah. Melalui BP Pipa inilah perempuan didorong untuk terlibat dalam perumusan kebijakan. Perempuan bersentuhan langsung dalam penggunaan energi. Maka seharusnya

mereka mendapat ruang dalam forum perencanaan pembangunan, baik kebijakan maupun alokasi anggaran.

Salah satu nilai Koalisi Perempuan Indonesia adalah berwawasan lingkungan. Pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 dijelaskan, berwawasan lingkungan : kesadaran, kepedulian, pengetahuan dan komitmen untuk bekerjasama baik secara individu maupun kolektif untuk memecahkan masalah lingkungan, tanggap bencana, merawat dan mempertahankan keseimbangan serta kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Melalui pemanfaatan Energi Bersih Terbarukan (EBT) diharapkan mampu menjadi upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mutu generasi masa kini dan masa depan ada di tangan perempuan. Maka sudah seharusnya mereka mampu menjadi agen perubahan.

Lasiyem, salah satu anggota balai perempuan yang kini berjuang. Ia menyampaikan betapa pentingnya peran perempuan dalam isu energi. Ibu dua anak ini mempersilakan salah satu ruangan yang ada dirumahnya untuk tempat berkumpul. Hal tersebut diungkapkan melalui gambar rumah idaman.

“Saya ingin berguna untuk orang lain,” tuturnya. Ia mempersilakan rumahnya digunakan untuk sekretariat Balai Perempuan Gedangan. Lasiyem juga berharap semua rumah tangga dapat mengakses energi dengan mudah dan sehat.

(EDJ 2019)

PERAN STRATEGIS PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN GOALS 7 TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Oleh: Ria Yulianti

Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah kembali mengadakan Dialog Publik untuk yang ke-3 kalinya, hal ini bertujuan agar informasi terkait Energi Bersih dan Terbarukan dapat sampai kepada masyarakat secara luas. Dialog kali ini mengangkat tema tentang peran strategis perempuan untuk mewujudkan goals 7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau banyak dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah tindak lanjut dari Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030.

Goals 7 dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terkait dengan “Energi bersih dan terjangkau” dengan 5 target untuk upaya pencapaian keberhasilan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan energi yang terjangkau, andal dan modern;
2. Pada tahun 2030, meningkatkan secara substansial proporsi energi terbarukan dalam energi global;
3. Pada tahun 2030, meningkatkan dua kali lipat angka perbaikan efisiensi energi global;
4. Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses terhadap teknologi dan riset energi bersih termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih dan maju, serta meningkatkan investasi infrastruktur

energi dan teknologi energi bersih;

5. Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi penyedia layanan energi modern dan berkelanjutan untuk semua negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang kepulauan kecil, dan negara berkembang terkurung daratan, sesuai program dukungan masing-masing.

Saat ini banyak kebijakan baik ditingkat nasional maupun wilayah telah terdapat beberapa kebijakan terkait akses terhadap energi, antara lain:

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi;
2. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 yang diterjemahkan ke dalam *Blueprint* Pengelolaan Energi Nasional 2006-2025;
3. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional;
4. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)

PEREMPUAN DAN ENERGI BERSIH TERBARUKAN

Energi digunakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat baik dalam kegiatan rumah tangga, pemerintahan, bisnis mulai dari usaha kecil sampai industri besar. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat pengguna energi terkadang tidak terlibat dalam perencanaan kebijakan bidang energi, juga tidak mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baik tentang energi (sumber-sumber, pengelolaan, dampak dari penggunaan sumber energi yang berbeda).

Perempuan sebagai warga Negara memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik dan kebijakan terkait energi adalah salah satunya. Secara global, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan memiliki prinsip “tidak seorangpun boleh ditinggalkan dalam pembangunan”, oleh karena itu kita harus dapat memastikan setiap pihak dapat memperoleh akses yang sama akan pemenuhan energi dengan tidak meninggalkan kelompok-kelompok rentan dan inklusi.

Kelangkaan energi akan merugikan masyarakat, termasuk perempuan, dimana perempuan menjadi kesulitan menjalankan peran-perannya. Perempuan adalah pengguna atau konsumen energi yang besar untuk menjalankan peran-peran reproduktif, produktif dan sosial. Peran reproduktif yang lekat dengan peran domestik perempuan seperti memasak, mencuci, menyeterika, membersihkan rumah, menyimpan ASI, mengasuh anak termasuk memastikan anak-anak belajar dengan nyaman adalah bagian peran dimana perempuan memerlukan energi untuk mengerjakannya. Peran produktif dijalankan sebagian besar perempuan saat ini untuk mencari nafkah. Antara lain dengan jalan berdagang, bekerja kantoran, bekerja di sektor industri dll. Sedangkan peran sosial dijalankan perempuan sebagai anggota masyarakat. Misalnya ketika perempuan berorganisasi memerlukan penerangan untuk pertemuan, energi untuk sumber tenaga peralatan elektroniknya.

Perempuan memiliki informasi mengenai sumber-sumber potensial untuk dikembangkan sebagai sumber energi namun secara keterampilan dan pengetahuan kebijakan tidak mereka kuasai sehingga hal tersebut sangatlah disayangkan. Perempuan di area perdesaan terbiasa menggunakan kayu/ranting/daun-daun kering sebagai sumber energi memasak atau perapian untuk menghangatkan hewan ternaknya. Dengan sumber daya alam yang melimpah di lingkungan sekitar tempat tinggal, perempuan-perempuan dapat dengan mudah memperoleh kayu/ranting/daun-daun kering untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sumber-sumber energi sebenarnya banyak disekitar kita, namun terkadang kita tidak menyadari karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan akan pengelolannya. Sumber-sumber energi lain ada di sekitar perempuan seperti kotoran hewan, kotoran manusia, matahari, angin, air terjun, sampah. Namun sangat disayangkan bahwa tidak semua perempuan mampu mengolahnya. Padahal sumber energi tersebut akan sangat membantu perempuan seperti untuk urusan domestik atau urusan produksi skala kecil.

KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN ENERGI

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai tujuan global dapat dicapai melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional maupun Daerah. RPJMN/RPJMD disusun mulai dari tingkat dusun, desa, kecamatan hingga tingkat nasional, dimana setiap tahapannya harus melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk perempuan. Program kerja masing-masing tingkatan harus memperhatikan kebutuhan perempuan, termasuk dalam hal ini kebutuhan bidang energi. Perempuan memerlukan energi yang dapat digunakan secara berkesinambungan, ada terus-menerus. Perempuan juga memerlukan sumber energi dan hasil olahannya yang tidak merusak lingkungan, ini perlu menjadi pertimbangan karena keadaan lingkungan akan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat tentunya.

Perempuan dapat terlibat pada kegiatan musrenbang guna membahas Energi Bersih Terbarukan. Jika kita kaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan khususnya Goals 7 maka setiap orang harus dapat memastikan akses untuk pemenuhan akan energi dan tidak seorangpun boleh ditinggal, termasuk perempuan, disabilitas, ODHA dan kelompok rentan serta inklusi. Keterlibatan perempuan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yaitu dengan terlibat di RPJMN, RPJMD atau forum-forum lain yang dapat menyuarakan akan isu energi yang bersih. Koalisi Perempuan Indonesia merupakan salah satu organisasi yang ikut mengawal RPJMN di tingkat nasional, sedangkan tingkat wilayah saat ini Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah tengah melakukan dialog bersama Pemerintah Daerah Jawa Tengah. ([link2](#))



EXPERT MEETING: MENDORONG PENTINGNYA KEBIJAKAN YANG ADIL GENDER DALAM MEWUJUDKAN ENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN

Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan penelitian terkait energi bersih di daerah Halmahera Tengah, Kepulauan Seribu-Jakarta, Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga, untuk mengetahui potensi sumber air bersih terbarukan yang dapat digunakan sebagai energi alternatif di Indonesia. Hal ini karena energi mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang sangat bergantung pada energi untuk melakukan aktifitas dan negara telah menjamin akan pemenuhan atas energi kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Berbagai kebijakan tentang energi telah berlaku di Indonesia, namun apakah kebijakan itu telah mengakomodir kebutuhan perempuan dan kelompok rentan dalam mengakses kebutuhan energi bersih dan berkelanjutan. Untuk itu Koalisi Perempuan Indonesia telah menyusun rekomendasi yang dituangkan dalam *policy brief* (Kertas Posisi) pentingnya mendorong kebijakan yang adil gender dalam mewujudkan energi bersih dan terbarukan.

Di Jakarta, pada tanggal 30 Oktober 2019, Koalisi Perempuan Indonesia telah melakukan Workshop untuk bersama dengan ahli membahas draft kertas posisi agar sesuai dengan kebutuhan. Kegiatan ini dibuka oleh Sutriyatmi – Deputi Sekjend Bidang

Program dalam pengantarnya menyampaikan bahwa pentingnya Koalisi Perempuan Indonesia terlibat dalam proses advokasi, karena masih minimnya keterlibatan dalam isu energi, terbatasnya pengetahuan perempuan terkait energi dan menjadi konsumen yang belum tahu haknya". Kegiatan berlangsung sehari ini diikuti oleh CSO yang bergerak di isu energi antara lain, IESR, Yayasan Rumah Energi, YLKI, IESR, IBEKA, juga Koalisi Perempuan Indonesia Wilayah Jawa Tengah & Kota Salatiga.

Workshop yang dipandu oleh Mike Verawati Tangka (Sekwil DKI Jakarta), menghadirkan pemantik diskusi Panca Saktiyani (IBEKA) yang menyampaikan tentang Pentingnya Pengembangan sumber energi terbarukan dan dampaknya pada kehidupan perempuan dan Masyarakat Miskin. Sigit Pranawa (LIPI) menyampaikan hasil riset terkait energi baru dan terbarukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga pemaparan hasil penelitian yang dilakukan Dewi Yani (Staf LITBANG) dan Ria Yulianti (Staf Reformasi Kebijakan Publik) terkait dengan Kertas Posisi.

Workshop telah menghasilkan beberapa rekomendasi dan langkah perbaikan untuk memperdalam lagi isu gender dalam kertas posisi. Ini terkait dengan isu energi yang masih terlihat maskulin, di lapangan sudah ada perempuan yang terlibat dalam upaya pengadaan energi seperti yang sudah dilakukan oleh IBEKA di Sumba. **(By2019)**



